



PENGENTASAN KEMISKINAN

Agenda yang Tidak Pernah Selesai

Editor :
Shadu Satwika Wijaya
Guntur Gunarto
Lilis Sri Sulistiani

***Pengentasan Kemiskinan:
Agenda yang Tidak
Pernah Selesai***

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014
tentang Hak Cipta

Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- a. Penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk. Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- b. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- c. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- d. Penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Muslih Faozanudin, Andi Zaelani, Darmanto Sahat Styawan,
Sukarso, Niken Paramarti Dasuki, Bambang Tri Harsanto,
Simin, Darmanto Sahat Satyawan, Sendy Noviko, Tobirin, Diah
Setyorini Gunawan, Rifda Naufalin, Denok Kurniasih, Pau-
lus Israwan Setyoko, Hikmah Nuraini, Wahyuningrat, Slamet
Rosyadi, Alizar Isna, Muhammad Yamin, Agus Ganjar Runtiko,
Dyah Wahyu Nastiti, Vellayati Hajad, Ikhsan, Zaula Rizky Atika,
Ranjani

***Pengentasan Kemiskinan:
Agenda yang Tidak
Pernah Selesai***



Pengentasan Kemiskinan: Agenda yang Tidak Pernah Selesai

Edisi Pertama
Copyright©2023
Cetakan Pertama: November, 2023

Ukuran: 15,5 cm x 23 cm; Halaman: xiv + 306

wi.2023.0334

Penulis:

Muslih Faozanudin, Andi Zaelani, Darmanto Sahat Styawan, Sukarso, Niken Paramarti Dasuki, Bambang Tri Harsanto, Simin, Darmanto Sahat Satyawan, Sedy Noviko, Tobirin, Diah Setyorini Gunawan, Rifda Naufalin, Denok Kurniasih, Paulus Israwan Setyoko, Hikmah Nuraini, Wahyuningrat, Slamet Rosyadi, Alizar Isna, Muhammad Yamin, Agus Ganjar Runtiko, Dyah Wahyu Nastiti, Vellayati Hajad, Ikhsan, Zaula Rizky Atika, Ranjani

Editor : 1. *Shadu Satwika Wijaya*
2. *Guntur Gunarto*
3. *Lilis Sri Sulistiani*

Cover : *Maulana Arifin*
Tata letak : *Dita Yuni Setiawati*

Penerbit
Wawasan Ilmu

Anggota IKAPI (215/JTE/2021)
Leler RT 002 RW 006 Desa Kaliwedi Kec. Kebasen Kab. Banyumas Jawa Tengah
53172

Email : naskah.wawasanilmu@gmail.com

Web : <https://wawasanilmu.co.id/>

ISBN : 978-623-132-155-8

All Right Reserved

Hak Cipta pada Penulis
Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanis, termasuk memfotokopi, merekam atau dengan sistem penyimpanan lainnya, tanpa izin tertulis dari penerbit.

PENGANTAR EDITORIAL

Bookchapter dengan judul “Pengentasan Kemiskinan: Agenda yang Tidak Pernah Selesai” ini akan membahas mengapa permasalahan ini belum terselesaikan, meski telah banyak usaha yang dilakukan. Buku ini mengkaji berbagai faktor yang membuat kemiskinan masih sulit dihapus dan apa yang harus dilakukan dalam upaya mengatasi masalah ini. Buku ini, membahas hambatan yang muncul, mencari tahu apa yang telah berhasil dan belajar dari pengalaman masa lalu tentang upaya pengentasan kemiskinan. Semua ini diharapkan dapat memberikan pemahaman lebih mendalam mengenai permasalahan kemiskinan. Buku ini ditujukan kepada pemerintah, masyarakat sipil, dan akademisi, serta pemerhati masalah sosial. "Pengentasan Kemiskinan: Agenda yang Belum Tuntas" ini adalah pengingat akan tanggung jawab bersama kita untuk menghadapi masalah yang mendesak ini dan mendorong semua pihak untuk memperbaiki dunia agar lebih adil dan merata. Buku ini membahas konseptualisasi kemiskinan dan menyajikan berbagai kasus upaya pengentasan kemiskinan yang telah dilakukan di berbagai belahan dunia. Ini akan memberikan wawasan mendalam mengenai bagaimana konsep kemiskinan telah berkembang dan menginspirasi tindakan nyata untuk mengatasi masalah ini. Buku ini adalah hasil kolaborasi kontributor yang berkomitmen pada perubahan sosial dan pembangunan berkelanjutan. Terimakasih telah bergabung dalam perjalanan penting ini.

Secara umum kemiskinan dapat diartikan sebagai suatu kondisi ketika seseorang atau sekelompok orang tidak memiliki akses yang memadai terhadap sumber daya ekonomi, seperti pendapatan, pekerjaan, pendidikan, dan perumahan. Ini adalah keadaan di mana kebutuhan dasar manusia, seperti pangan, pakaian, dan tempat tinggal, tidak dapat dipenuhi secara memadai. World Bank mendefinisikan kemiskinan sebagai sebuah kondisi ketika seseorang tidak memiliki akses terhadap peluang untuk memenuhi kebutuhan dasar, seperti makanan, air bersih, sanitasi, pendidikan, dan layanan kesehatan. Sedangkan menurut United Nations Development Programme (UNDP) kemiskinan tidak hanya berhubungan dengan kurangnya pendapatan. Tetapi mencakup ketidaksetaraan dalam akses terhadap layanan dan peluang, serta kekurangan dalam keamanan dan hak-hak dasar. Definisi berbeda dikemukakan oleh International Labour Organization (ILO) bahwa kemiskinan merupakan pelanggaran hak asasi manusia, mencerminkan ketidaksetaraan dalam distribusi peluang dan keuntungan ekonomi, serta keterbatasan akses terhadap pekerjaan yang layak. Perbedaan definisi kemiskinan bergantung pada konteks geografis, budaya, dan pandangan organisasi atau lembaga yang memberikan definisi.

Berdasarkan data dari BPS, angka kemiskinan di Indonesia menunjukkan penurunan pada tahun 2023 yaitu 9,36 persen. Angka ini lebih rendah dibandingkan angka pada tahun 2022 yaitu 9,57 persen. Data tersebut memperlihatkan bahwa penurunan angka kemiskinan hanya 0,21. angka kemiskinan di Indonesia bersifat spesifik wilayah, dengan garis kemiskinan yang spesifik untuk setiap wilayah perkotaan dan perdesaan di seluruh provinsi. Angka kemiskinan perkotaan dan perdesaan di Indonesia menunjukkan disparitas yang cukup tinggi. Angka kemiskinan di perkotaan menunjukkan angka 7,29 persen dengan jumlah penduduk 11,74 juta orang, sedangkan di perdesaan mencapai 12,22 persen yang mencakup jumlah penduduk 14,16 juta orang. Tingkat kemiskinan di Indonesia merupakan permasalahan kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti pertumbuhan ekonomi, kesenjangan antar wilayah, ketimpangan pendapatan, dan determinan sosial. Angka kemiskinan di Indonesia bersifat spesifik wilayah, dengan

garis kemiskinan yang spesifik untuk setiap wilayah perkotaan dan perdesaan di seluruh provinsi. Hal ini didukung oleh , yang melaporkan bahwa sekitar separuh penduduk Indonesia hidup di bawah Rp15.000 per hari, yaitu sekitar PPP USD 2,25 per hari, yang menunjukkan sebagian besar penduduk hidup dalam kemiskinan. Selain itu, digarisbawahi bahwa peringkat kemiskinan di Indonesia didasarkan pada garis kemiskinan nasional, di mana individu yang berpenghasilan kurang dari Rp440.538 (USD 30,2) per bulan dianggap hidup dalam kemiskinan (Kadir et al., 2021). Berdasarkan penyebabnya, kemiskinan terbagi menjadi 2 macam: (1) Kemiskinan kultural adalah kemiskinan yang disebabkan oleh adanya faktor-faktor adat atau budaya suatu daerah tertentu yang membelenggu seseorang atau sekelompok masyarakat tertentu sehingga membuatnya tetap melekat dengan kemiskinan (2) Kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang terjadi sebagai akibat ketidakberdayaan seseorang atau sekelompok masyarakat tertentu terhadap sistem atau tatanan sosial yang tidak adil, karenanya mereka berada pada posisi tawar yang sangat lemah dan tidak memiliki akses untuk mengembangkan dan membebaskan diri mereka sendiri dari perangkap kemiskinan atau dengan perkataan lain seseorang atau sekelompok masyarakat menjadi miskin karena mereka miskin. Secara konseptual menurut standar penilaiannya, kemiskinan dibagi menjadi kemiskinan relatif dan absolut: (1) Ukuran kemiskinan relatif merupakan standar kehidupan yang ditentukan dan ditetapkan secara subjektif oleh masyarakat setempat dan bersifat lokal serta mereka yang berada dibawah standar penilaian tersebut dikategorikan sebagai miskin secara relatif; (2) Standar penilaian kemiskinan secara absolut merupakan standar kehidupan minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar yang diperlukan, baik makanan maupun non-makanan. Standar kehidupan minimum untuk memenuhi kebutuhan dasar ini disebut sebagai garis kemiskinan.

Upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia dikaji dari berbagai sudut pandang. Diantaranya pertumbuhan ekonomi dan belanja publik, khususnya di bidang pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial, terhadap pengentasan kemiskinan di Indonesia, dan kebijakan pemerintah yang ditujukan untuk

mengentaskan kemiskinan. Hasil dari upaya pengentasan tersebut menunjukkan hasil yang beragam, dan bergantung pada kesesuaian antara program yang dilaksanakan dengan karakteristik kemiskinan. Buku bunga rampai ini bertujuan untuk melengkapi dan memperkaya referensi tentang kemiskinan bagi akademisi dan praktisi pemerhati masalah kemiskinan. Sedangkan isi buku terdiri dari berbagai artikel yang ditulis oleh akademisi sesuai dengan bidang keahliannya. Pembahasan dalam buku ini meliputi:

- Bab 1 Memahami Kemiskinan: Konsep, Jenis dan Strategi Penanggulungannya
- BAB 2 Faktor Penentu Kemiskinan
- BAB 3 Dekomoditasi Kemiskinan di Indonesia: Satu Refleksi Humanisme
- BAB 4 Penanggulangan Kemiskinan di Perdesaan Melalui Transformasi Ekonomi Petani
- BAB 5 Strategi Pemberdayaan Masyarakat Desa (Suatu Kajian Teoritis)
- BAB 6 Flexibilitas Birokrasi dan Kelembagaan dalam Mengatasi Kemiskinan Ekstrem Di Jawa Tengah Bagian Selatan
- BAB 7 Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem di Kabupaten Aceh Barat
- BAB 8 Entrepreneurship Sebagai Upaya untuk Mengurangi Kemiskinan
- BAB 9 Pengembangan Desa Wisata Sebagai Strategi Pengentasan Kemiskinan di Pedesaan
- BAB 10 Peran Inovasi dan Kreativitas Aparatur Desa dalam Pengentasan Kemiskinan
- BAB 11 Digitalisasi UMKM Sebagai Upaya Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Banyumas

- BAB 12 Public-Private Partnership dalam Menangani Kemiskinan dan Stunting di Perdesaan
- BAB 13 Dinamika Pengukuran Kemiskinan

Purwokerto, 9 Oktober 2023

Tim Editor

DILINDUNGI UU NO. 28 TAHUN 2014
DILARANG DIGANDAKAN DAN DISEBARLUASKAN

DILINDUNGI UU NO. 28 TAHUN 2014
DILARANG DIGANDAKAN DAN DISEBARLUASKAN

DAFTAR ISI

PENGANTAR EDITORIAL v

DAFTAR ISI xi

BAB 1

MEMAHAMI KEMISKINAN: KONSEP, JENIS DAN STRATEGI PENANGGULANGANNYA 1

BAB 2

FAKTOR PENENTU KEMISKINAN 35

BAB 3

DEKOMODITASI KEMISKINAN DI INDONESIA: SATU REFLEKSI HUMANISME 57

BAB 4

PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI PERDESAAN MELALUI TRANSFORMASI EKONOMI PETANI 75

BAB 5

STRATEGI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (SUATU KAJIAN TEORITIS) 97

BAB 6

FLEXIBILITAS BIROKRASI DAN KELEMBAGAAN
DALAM MENGATASI KEMISKINAN EKSTREM DI
JAWA TENGAH BAGIAN SELATAN 117

BAB 7

PENANGGULANGAN KEMISKINAN EKSTREM DI
KABUPATEN ACEH BARAT 145

BAB 8

ENTREPRENEURSHIP SEBAGAI UPAYA UNTUK
MENGURANGI KEMISKINAN..... 167

BAB 9

PENGEMBANGAN DESA WISATA SEBAGAI STRATEGI
PENGENTASAN KEMISKINAN DI PEDESAAN..... 193

BAB 10

PERAN INOVASI DAN KREATIVITAS APARATUR DESA
DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN..... 209

BAB 11

DIGITALISASI UMKM SEBAGAI UPAYA
PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KABUPATEN
BANYUMAS..... 243

BAB 12

PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP DALAM
MENANGANI KEMISKINAN DAN STUNTING DI
PERDESAAN..... 259

BAB 13

DINAMIKA PENGUKURAN KEMISKINAN 285

PROFIL PENULIS.....295

DILINDUNGI UU NO. 28 TAHUN 2014
DILARANG DIGANDAKAN DAN DISEBARLUASKAN

DILINDUNGI UU NO. 28 TAHUN 2014
DILARANG DIGANDAKAN DAN DISEBARLUASKAN

BAB 6
FLEXIBILITAS
BIROKRASI DAN
KELEMBAGAAN
DALAM MENGATASI
KEMISKINAN
EKSTREM DI JAWA
TENGAH BAGIAN
SELATAN

Tobirin, Diah Setyorini Gunawan, Rifda Naufalin

A. Pendahuluan

Birokrasi menghadapi tantangan dalam melaksanakan kegiatan secara efisien dan efektif. Di sisi lain birokrasi identik dengan kinerja yang berbelit-belit, struktur yang terlalu besar, penuh dengan kolusi, korupsi dan nepotisme, serta tidak ada standar yang pasti (Yusriadi & Misnawati, 2017). Rekam jejak birokrasi dianggap tidak profesional, tidak netral, dan sangat paternalistik yang menjadi akar korupsi, kolusi, dan nepotisme (Firnas, 2007). Rekam jejak birokrasi juga memiliki citra buruk, khususnya di negara sedang berkembang yang mewarisi tradisi korup dan kurang berpihak pada rakyat, kaku serta formalistis. Di sisi lain, menghadapi masyarakat dan ekonomi yang digerakkan inovasi teknologi maka birokrasi di negara sedang berkembang dihadapkan pada tuntutan efisiensi, produktivitas, akses rakyat terhadap informasi, kepastian, dan rasa aman (Arifah, 2020).

Konsep birokrasi Weberian yang bersifat formal, struktural, hirarkis, dan berbasis pada aturan, di abad ke-21 menemui tantangan reformasi dari sekedar birokrasi di sektor publik menjadi meluas ke sektor privat (Meier & Hill, 2005). Birokrasi yang berbasis *The Old Public Administration* berpegang pada prinsip Weber dengan ciri utama *rational choice* yang mengabaikan aspek kemanusiaan, tertutup dan kontrol publik minim, ukuran efisiensi bukan *responsiveness*, bersifat *top-down* dipandang tidak memberikan ruang bagi inisiatif dari bawah, penghambat pembangunan dan dinamika sosial, serta mengabaikan hak-hak warga negara.

New Public Management (NPM) merupakan tonggak pergeseran gagasan dari pemerintah (*government*) ke pemerintahan (*governance*), dimana lebih menekankan pada tata kelola yang melibatkan banyak peran, terlebih peran swasta. *New Public Management* dipandang mengesampingkan partisipasi publik sehingga muncul konsep *New Public Service* (NPS) yang dipelopori oleh Janet V. Dendhardt dan Robert B. Dendhardt yang menekankan pada prinsip melayani warga, berorientasi pada kepentingan publik, mengutamakan nilai kemasyarakatan, berpikir strategis dan bertindak demokratis, serta berorientasi pada pelayanan publik.

Birokrasi di abad ke-21 menghadapi tantangan baik dari aspek teoritis (intelektual) maupun praktis. Tantangan-tantangan tersebut antara lain meliputi tantangan politik untuk mereformasi birokrasi; ide New Public Management untuk privatisasi; tantangan postmodernisme, yaitu desentralisasi, partisipasi yang lebih luas, dan client-driven organizations; serta tantangan model Principal-Agent (Meier & Hill, 2005). Globalisasi di awal milenium mempengaruhi revolusi tatanan pemerintahan dimana reformasi birokrasi menjadi kunci untuk meningkatkan daya saing. Terkait reformasi birokrasi dibutuhkan adanya komitmen politik. Perubahan masyarakat mendorong menguatnya tuntutan terhadap pelayanan yang berkualitas, cepat, dan akurat sehingga transformasi atau perubahan internal birokrasi baik secara institusional maupun individu menjadi kebutuhan. Good governance merupakan muara dari penyelenggaraan pelayanan publik yang membutuhkan kompetensi birokrasi untuk mendesain dan melaksanakan kebijakan (Haning, 2018).

Solusi untuk perbaikan pemerintahan pada saat ini adalah dengan melakukan perubahan mendasar baik mind set maupun culture set dari yang bersifat mengawasi, mengontrol dan menguasai (colonial paradigm), menjadi good public service serta meminimalisir kolusi, korupsi, dan nepotisme (Ginting & Haryati, 2011). Proses dalam reformasi birokrasi adalah proses yang sistematis, terpadu, dan komprehensif yang ditujukan untuk merealisasikan tata pemerintahan yang baik. Reformasi birokrasi merupakan proses politik untuk menyesuaikan hubungan antara birokrasi dan elemen masyarakat sipil dan swasta, maupun di dalam birokrasi itu sendiri. Reformasi birokrasi dilakukan dalam upaya menuju perubahan untuk pemerintahan yang lebih baik dalam melayani masyarakat dan sesuai dinamika perubahan sebagai bagian dari demokratisasi terutama peralihan budaya birokrasi yang paternalistik menuju birokrasi yang terbuka terhadap masukan dan kritikan (Putera, 2009).

Di Indonesia, reformasi birokrasi merupakan agenda penting. Hal ini sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 yang membagi tiga fase reformasi birokrasi. Fase pertama (tahun 2009-

2014), pencapaian rule-based bureaucracy. Fase kedua (tahun 2015-2019), menjadi performance based bureaucracy. Fase ketiga (tahun 2020-2025), menjadi dynamics governance atau birokrasi berkelas dunia. Reformasi birokrasi di Indonesia memiliki fokus delapan area perubahan yang meliputi: 1) Manajemen Perubahan, 2) Penataan Peraturan Perundang-Undangan, 3) Penataan dan Penguatan Organisasi, 4) Penataan Tatalaksana, 5) Penataan Sistem Manajemen SDM, 6) Penguatan Akuntabilitas, 7) Penguatan Pengawasan, dan 8) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

Diharapkan pada akhir periode Grand Design, yaitu pada tahun 2025 telah dihasilkan governance yang berkualitas. Semakin baik kualitas governance, semakin baik pula hasil pembangunan (development outcomes) yang ditandai dengan tidak ada korupsi, APBN/APBD efektif dan efisien, semua program dapat selesai dengan baik, semua perizinan selesai dengan cepat dan tepat, komunikasi dengan publik berjalan dengan baik, penggunaan waktu atau jam kerja efektif dan produktif, adanya penerapan reward and punishment secara konsisten dan berkelanjutan, serta adanya hasil pembangunan yang nyata (pertumbuhan, prolapsangan kerja, dan propengurangan kemiskinan).

Di Provinsi Jawa Tengah, reformasi birokrasi menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang tertuang dalam visi dan misi Provinsi Jawa Tengah tahun 2018 – 2023. Misi ke-2 yaitu Mempercepat reformasi birokrasi yang dinamis serta memperluas sasaran ke pemerintahan Kabupaten/Kota. Misi tersebut memiliki tujuan utama: 1) menciptakan pelayanan publik yang dinamis melalui open government dan pemerintahan yang responsif; 2) meningkatkan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan melalui perencanaan, penganggaran, serta evaluasi pembangunan yang akuntabel; 3) mengembangkan manajemen sumberdaya manusia aparatur yaitu fokus pada integritas (kompetensi dan etika) baik secara pribadi dan institusi, mengembangkan budaya inovatif, dan quality assurance aparatur.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 28 Tahun 2019 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2023, substansi dari ketentuan tersebut adalah bahwa

Reformasi Birokrasi harus dilaksanakan secara komprehensif, simultan, dan berkelanjutan. Reformasi birokrasi tidak saja mengubah prosedur dan kelembagaan, tetapi mampu merubah mind set dan culture set birokrasi, sikap dan perilaku aparatur negara menjadi bersih, profesional, melayani, sejahtera, dan netral. Terdapat tiga dimensi utama Arah Reformasi Birokrasi tahun 2019-2023. Pertama, pelayanan publik yang semakin dinamis dengan membangun open government dan pemerintahan yang responsive. Kedua, efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan melalui proses perencanaan, penganggaran, dan evaluasi pembangunan yang akuntabel. Ketiga, kapasitas kelembagaan serta manajemen sumber daya manusia aparatur yang semakin baik dengan mendorong birokrasi yang inovatif dan dijamin dalam quality assurance aparatur.

Area reformasi birokrasi sesuai regulasi tersebut di atas terdiri dari tiga bidang yang meliputi pelayanan publik, sistem manajemen pemerintahan, dan peningkatan kapasitas kelembagaan perangkat daerah serta manajemen sumber daya aparatur. Road Map tahun 2019-2023 juga memiliki beberapa quick wins, yaitu pembentukan pelayanan terintegrasi, layanan sistem satu data, satu perangkat daerah satu inovasi, dan arsip Elektronik Masyarakat (EMAS).

Reformasi pelayanan publik dimulai dengan pembukaan akses yang lebih luas kepada publik, peningkatan transparansi, dan partisipasi melalui kanal aduan masyarakat, serta inovasi layanan publik terutama berbasis teknologi informasi. Reformasi sistem manajemen pemerintahan dilakukan dengan membangun sistem pengendalian internal dan sistem manajemen pemerintahan melalui konsep Government Resources Management System (GRMS) yang sudah dimulai sejak tahun 2014. Reformasi peningkatan kapasitas kelembagaan dan manajemen sumber daya manusia dilakukan melalui penataan kelembagaan perangkat daerah yang efektif dan efisien serta perbaikan manajemen kepegawaian dengan sistem penilaian kompetensi talent scouting untuk pengisian jabatan, serta perbaikan manajemen kinerja pegawai, termasuk skema penghasilan pegawai.

Reformasi birokrasi di Indonesia terlalu fokus pada perubahan internal dan belum melihat dampak terhadap pembangunan atau

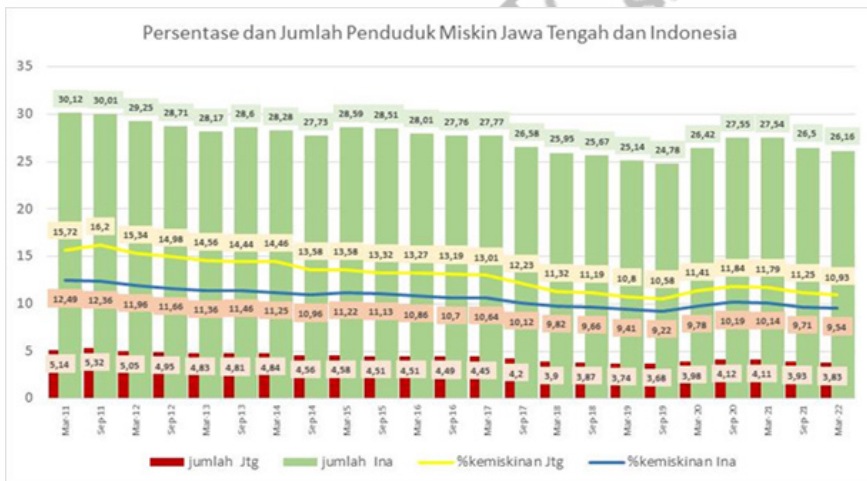
perbaikan pelayanan publik, masih bersifat proyek, dan rendahnya keterlibatan pemangku kepentingan. Meskipun reformasi birokrasi telah menghasilkan perubahan, namun belum memberi dampak signifikan dan menyisakan berbagai catatan, yaitu belum menysasar pada penyelesaian persoalan strategis instansi dan nasional, serta sebagian besar masih bersifat perubahan ke dalam (inward-looking) yang lebih bersifat formalitas belaka. Atas dasar hal tersebut, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia merumuskan konsep baru berupa Reformasi Birokrasi Tematik, dimana reformasi birokrasi harus menysasar pada isu atau tema utama. Ada empat fokus Reformasi Birokrasi Tematik yang ditetapkan saat ini, yaitu: pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, akselerasi digitalisasi administrasi pemerintahan, dan merespons serta mengawal hal-hal yang mendesak (seperti stunting, penggunaan produk dalam negeri, dan lainnya).

Perkembangan pelaksanaan dan capaian Indeks Reformasi Birokrasi di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sejak tahun 2018 hingga 2021 mengalami trend positif dan terdapat peningkatan tiap tahunnya. Selama kurun waktu 2018 hingga 2021 capaian perbandingan target dan realisasi Indeks Reformasi Birokrasi masih tercapai dengan baik bahkan melebihi target yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 yang juga sejalan dengan target dalam Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2023. Di tahun 2018, capaian Indeks Reformasi Birokrasi sebesar 74,75 dari target 74, dan di tahun 2021 menjadi 78,97 dari target 78.

Di sisi lain, terdapat beberapa target pembangunan yang belum tercapai, meskipun reformasi birokrasi mengalami kemajuan. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai esensi reformasi birokrasi terhadap peran birokrasi itu sendiri. Salah satu isu penting di Provinsi Jawa Tengah dan perlu diselesaikan oleh pemerintah daerah adalah kemiskinan. Angka kemiskinan Jawa Tengah berdasarkan data Badan Pusat Statistik selama beberapa tahun terakhir berada di atas angka nasional. Pada tahun 2011 (Maret) angka kemiskinan Provinsi Jawa Tengah sebesar 15,72 persen, sedangkan angka

kemiskinan nasional sebesar 12,49 persen. Pada tahun 2021 (Maret) angka kemiskinan Provinsi Jawa Tengah sebesar 11,79 persen, sedangkan angka nasional sebesar 10,14 persen. Angka tersebut menurun pada September 2021 menjadi sebesar 11,25 persen atau 3,93 juta jiwa. Pada Maret 2022, angka kemiskinan sebesar 10,93 persen atau 3,83 juta jiwa. Pada bulan September 2022 menjadi 10,98 persen atau 3,86 juta jiwa.

Jika dilihat berdasarkan data tahunan, percepatan penurunan kemiskinan Jawa Tengah cukup baik dibandingkan di tingkat nasional. Dapat dilihat bahwa gap angka kemiskinan nasional dan Provinsi Jawa Tengah semakin berkurang dari tahun ke tahun. Pandemi Covid-19 menyebabkan peningkatan angka kemiskinan baik di tingkat nasional maupun di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2020 dan 2021.

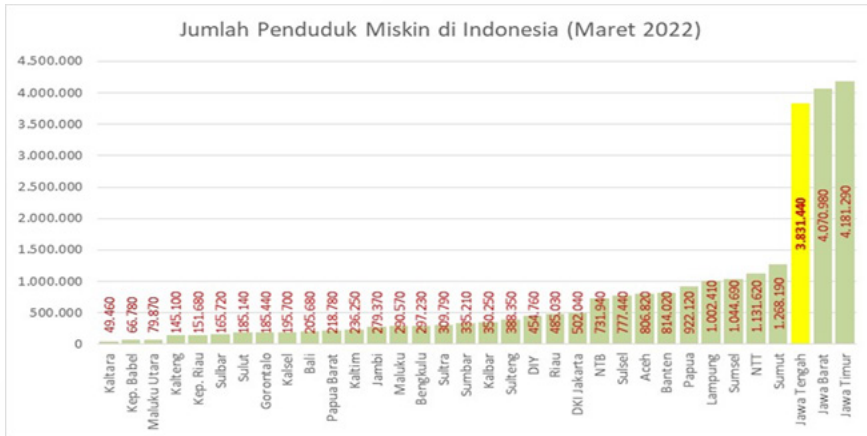


Gambar 1. Persentase dan Jumlah Penduduk Miskin Jawa Tengah dan Indonesia

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, 2022 (diolah)

Jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Tengah pada bulan Maret 2022 sebesar 3,83 juta jiwa, sementara jumlah di tingkat nasional sebesar 26,16 juta jiwa. Berdasarkan data tersebut, kontribusi jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Tengah terhadap jumlah penduduk miskin nasional sebesar 14,64 persen. Secara kumulatif, jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Tengah

merupakan yang terbesar ketiga di Indonesia setelah Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Jawa Barat.



Gambar 2. Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia (Maret 2022)
 Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, 2022 (diolah)

Upaya penanggulangan kemiskinan di Jawa Tengah tertuang dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 60 Tahun 2019 tentang Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2023. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa strategi penanggulangan kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah terdiri dari: 1) Penyediaan basic life access untuk penduduk miskin perkotaan dan perdesaan; 2) Penguatan sustainable livelihood dalam kerangka mengurangi pengangguran dan menjaga kelompok rentan dari kehilangan pekerjaan; 3) Peningkatan ketersediaan dan kecukupan pangan; serta 4) Penguatan tata kelola dan koordinasi kelembagaan penanggulangan kemiskinan. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah mengalokasikan anggaran yang cukup banyak untuk kemiskinan, terutama di beberapa tahun terakhir. Mulai dari tahun anggaran 2013/2014 sampai dengan 2020/2021 Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengalokasikan anggaran untuk program penanggulangan kemiskinan yang disalurkan melalui berbagai OPD di Provinsi Jawa Tengah. Program-program tersebut antara lain Kartu Jateng Sejahtera (KJS), Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda), Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Bansos RTLH), Bantuan Siswa Miskin (BSM), Kartu Tani, Kartu Nelayan, kredit usaha bunga rendah, pendampingan 1 OPD 1 Desa, dan sebagainya.

Beberapa upaya tersebut belum mampu mendorong percepatan penanggulangan kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah. Kinerja birokrasi perlu ditingkatkan untuk menciptakan kondusivitas agar percepatan penanggulangan kemiskinan dapat berlangsung dengan baik. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang lebih mendalam dalam mengarahkan reformasi birokrasi agar memberikan dampak bagi pengurangan kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah. Dalam penelitian ini, lingkup wilayah penelitian adalah Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Banyumas, dan Kabupaten Cilacap. Penelitian ini akan mengkaji tentang percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Banyumas, dan Kabupaten Cilacap melalui reformasi birokrasi. Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Banyumas, dan Kabupaten Cilacap dipilih sebagai lingkup wilayah penelitian karena kabupaten-kabupaten tersebut termasuk kantong kemiskinan di wilayah Provinsi Jawa Tengah. Menurut Badan Pusat Statistik, kemiskinan merupakan kondisi ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar, yaitu makanan, air bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, dan akses informasi terhadap pendapatan dan layanan sosial. Seseorang dikategorikan miskin ekstrem jika biaya kebutuhan hidup sehari-harinya berada dibawah garis kemiskinan; setara dengan USD1,9 PPP (Purchasing Power Parity). PPP ditentukan menggunakan absolute poverty measure yang konsisten antar negara dan antar waktu.

B. Strategi Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Wonosobo, Banyumas dan Cilacap

1. Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Wonosobo

Pemerintah Kabupaten Wonosobo senantiasa berupaya melakukan penanggulangan kemiskinan di wilayah Kabupaten Wonosobo. Upaya penanggulangan kemiskinan diwujudkan dalam Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD). Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah adalah dokumen strategi percepatan penanggulangan kemiskinan daerah yang selanjutnya digunakan sebagai rancangan kebijakan pembangunan daerah di bidang percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten

Wonosobo.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2018 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, kemiskinan adalah kondisi dimana seseorang tidak mampu memenuhi hak-hak dasar antara lain kebutuhan pangan, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan sesuai standar minimal. Kemiskinan adalah masalah yang bersifat multidimensi dan multisektor dengan beragam karakteristiknya dan merupakan kondisi yang harus segera diatasi untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan manusia yang bermartabat. Untuk mencapai target penurunan angka kemiskinan perlu dilakukan langkah-langkah strategis dan terintegrasi berbagai program percepatan penanggulangan kemiskinan.

Percepatan penanggulangan kemiskinan adalah kebijakan dan program Pemerintah Daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat. Program percepatan penanggulangan kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha mikro dan kecil serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk percepatan penanggulangan kemiskinan di tingkat kabupaten, kecamatan dan desa.

Asas yang digunakan sebagai dasar dalam percepatan penanggulangan kemiskinan meliputi kemanusiaan, keadilan sosial, nondiskriminasi, kesejahteraan, kesetiakawanan, dan pemberdayaan. Sedangkan tujuan percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Wonosobo antara lain:

- a. Melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin.

- b. Mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dalam pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat.
- c. Memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil.
- d. Mewujudkan peningkatan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin.

Program percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Wonosobo terdiri dari:

- a. Kelompok program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga, bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup penduduk miskin.
- b. Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat, bertujuan untuk mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok penduduk miskin untuk terlibat dalam pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat.
- c. Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, bertujuan untuk memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil.
- d. Kelompok program-program lainnya yang baik secara langsung ataupun tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan penduduk miskin.

Terkait dengan data kemiskinan, persentase penduduk miskin di Kabupaten Wonosobo masih berada di atas persentase penduduk miskin di Provinsi Jawa Tengah. Tabel 22 menunjukkan persentase penduduk miskin di Kabupaten Wonosobo dan Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2018-2022.

Tabel 22. Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Wonosobo dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2022 (dalam Persen)

Kabupaten/ Provinsi	2018	2019	2020	2021	2022
Kabupaten Wonosobo	17,58	16,63	17,36	17,67	16,17
Provinsi Jawa Tengah	11,32	10,80	11,41	11,79	10,93

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Wonosobo, 2023

Berdasarkan Tabel 22, dapat diketahui bahwa persentase penduduk miskin di Kabupaten Wonosobo pada tahun 2018-2022 berfluktuasi dan masih di atas persentase penduduk miskin di Provinsi Jawa Tengah. Pada tahun 2020 dan 2021, persentase penduduk miskin di Kabupaten Wonosobo mengalami peningkatan. Peningkatan persentase penduduk miskin pada tahun tersebut disebabkan adanya pandemi Covid-19 yang menyebabkan kelesuan perekonomian Kabupaten Wonosobo.

Kemiskinan dan stunting merupakan dua permasalahan utama yang dihadapi Kabupaten Wonosobo. Tahun 2023 menjadi tahun percepatan dalam penanganan kemiskinan di Kabupaten Wonosobo. Pemerintah Kabupaten Wonosobo melalui Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah berupaya untuk merumuskan dan melakukan terobosan yang efektif untuk dapat menurunkan angka kemiskinan secara signifikan (Pemerintah Kabupaten Wonosobo, 2023).

Kemiskinan di Kabupaten Wonosobo memiliki penyebab yang kompleks. Kondisi ini memerlukan penanganan lintas sektor dengan intervensi dan treatment yang sesuai dengan karakteristik masing-masing wilayah. Penanganan yang komprehensif diharapkan dapat mengurai dan menyelesaikan masalah di tiap-tiap wilayah Kabupaten Wonosobo secara tepat sasaran. Penanganan kemiskinan yang komprehensif dilakukan dengan melihat kemiskinan tidak

hanya dari sisi pendapatan yang diterima per kapita, tetapi juga memandang kemiskinan dari sisi ekonomi, sosial, budaya, dan letak geografis suatu wilayah. Intervensi kemiskinan berbasis karakteristik wilayah diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan secara tepat sasaran.

Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah memiliki peranan dalam upaya pengentasan kemiskinan. Transfer ke Daerah dan Dana Desa fokus pada upaya meningkatkan pemerataan keuangan antardaerah, meningkatkan kualitas dan mengurangi ketimpangan layanan publik daerah, menciptakan lapangan kerja, serta mengentaskan kemiskinan. Formula pengalokasian Dana Desa dibuat semakin fokus dalam rangka pengentasan kemiskinan dan ketertinggalan geografis, antara lain melalui pemberian afirmasi kepada desa tertinggal dengan jumlah penduduk miskin tinggi dan pemberian bobot yang lebih besar kepada jumlah penduduk miskin. Tabel 23 menunjukkan realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Kabupaten Wonosobo tahun 2018-2022.

Tabel 23. Realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Kabupaten Wonosobo Tahun 2018-2022 (dalam Miliar Rupiah)

Akun	2018	2019	2020	2021	2022
Transfer ke Daerah	1.148,56	1.271,39	1.169,84	1.169,66	1.193,99
Dana Bagi Hasil	34,63	30,45	36,68	47,91	48,43
Dana Alokasi Umum	827,79	877,47	799,11	792,38	792,38
Dana Alokasi Khusus Fisik	76,64	122,54	77,12	100,34	67,94
Dana Insentif Daerah	8,75	33,82	45,07	10,46	3,51
Dana Alokasi Khusus Nonfisik	200,74	207,10	211,85	218,57	281,72
Dana Desa	184,41	212,11	217,23	218,57	221,89
Total TKDD	1.332,97	1.483,5	1.387,06	1.388,23	1.415,87

Sumber: Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2023

Berdasarkan Tabel 23, dapat diketahui realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Kabupaten Wonosobo tahun 2018-2022. Transfer ke Daerah mengalami penurunan pada tahun 2020 dan 2021. Penurunan transfer ke Daerah pada tahun 2020 dan 2021 disebabkan dampak mewabahnya pandemi Covid-19 di berbagai daerah di Indonesia. Hal ini mempengaruhi kinerja penyaluran TKDD di daerah, termasuk di Kabupaten Wonosobo. Di masa pandemi Covid-19, pemerintah pusat dan pemerintah daerah masih berfokus pada penanganan dampak pandemi Covid-19.

Terkait dengan Dana Desa, penerimaan Dana Desa Kabupaten Wonosobo senantiasa mengalami peningkatan pada periode 2018-2022. Pemanfaatan Dana Desa diarahkan guna mendukung

pemulihan ekonomi dan sektor prioritas dalam rangka mempercepat pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Terkait pandemi Covid-19, Dana Desa juga dipergunakan untuk pembiayaan jaring pengaman sosial berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi warga desa yang terdampak.

Data yang dipergunakan untuk menghitung pagu Dana Desa berasal dari lintas Kementerian Negara/Lembaga. Kementerian Dalam Negeri menyediakan data jumlah desa dan jumlah penduduk, Kementerian Desa menyiapkan data Indeks Desa Membangun (IDM) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan Pendapatan Asli Desa (PADes), Kementerian Sosial menyerahkan data jumlah penduduk miskin, dan Kementerian Keuangan menyediakan data kinerja penyerapan dan capaian keluaran (output) Dana Desa. Sementara itu, data luas wilayah serta data Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) dan Indeks Kesulitan Geografis (IKG) desa diperoleh dari Badan Pusat Statistik. Seluruh data tersebut diolah sedemikian rupa sehingga menghasilkan formula pengalokasian Dana Desa, yang meliputi Alokasi Dasar (65%), Alokasi Formula (30%), Alokasi Afirmasi (1%), dan Alokasi Kinerja (4%)

Dana Desa sangat berpotensi untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat desa. Akan tetapi, perlu kewaspadaan ekstra terhadap kemungkinan hambatan dalam penyaluran dan pemanfaatannya. Lebih jauh lagi, Dana Desa yang bersumber dari APBN berperan sangat besar dalam mewujudkan pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi Covid-19.

Dalam hal keterkaitan Dana Desa dan persentase penduduk miskin di Kabupaten Wonosobo tahun 2018-2022, dapat diketahui bahwa adanya pandemi Covid-19 menyebabkan meningkatnya persentase penduduk miskin di Kabupaten Wonosobo pada tahun 2020 dan 2021 meskipun Dana Desa yang diterima Kabupaten Wonosobo senantiasa mengalami peningkatan pada tahun 2018-2022. Persentase penduduk miskin Kabupaten Wonosobo pada tahun 2022 mengalami penurunan sejalan dengan meningkatnya Dana Desa yang diterima Kabupaten Wonosobo. Pemanfaatan Dana Desa yang tepat sasaran diharapkan dapat mendukung upaya pengentasan kemiskinan di Kabupaten Wonosobo.

2. Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Banyumas

Pemerintah Kabupaten Banyumas senantiasa berupaya melakukan penanggulangan kemiskinan di wilayah Kabupaten Banyumas. Upaya penanggulangan kemiskinan diwujudkan dalam pembentukan Tim Koordinasi dan Sekretariat Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Banyumas. Tim Koordinasi dan Sekretariat Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Banyumas diatur dalam Keputusan Bupati Banyumas Nomor: 050/137/Tahun 2021. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Banyumas memiliki tugas sebagai berikut:

- a. Mengkoordinasikan perumusan kebijakan program penanggulangan kemiskinan.
- b. Mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Banyumas.
- c. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah.

Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Banyumas dibantu Tim Sekretariat Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Banyumas. Tim Sekretariat Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Banyumas memiliki tugas sebagai berikut:

- a. Memberikan dukungan administrasi teknis dan dukungan bahan kebijakan kepada Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Banyumas.
- b. Menyiapkan data dan informasi penanggulangan kemiskinan.
- c. Menyiapkan bahan RPKD, rencana aksi dan agenda kerja tahunan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21 Tahun 2014 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, kemiskinan adalah suatu kondisi sosial ekonomi seseorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhi hak-hak dasarnya

untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Kemiskinan adalah masalah yang bersifat multi dimensi, multi sektor dengan beragam karakteristik yang harus segera diatasi karena menyangkut harkat dan martabat manusia. Penanggulangan kemiskinan merupakan salah satu tanggung jawab Pemerintah Daerah yang memerlukan keterpaduan program di antara lembaga dan dunia usaha serta melibatkan partisipasi masyarakat.

Penanggulangan kemiskinan adalah kebijakan dan program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat. Program percepatan penanggulangan kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk percepatan penanggulangan kemiskinan di daerah.

Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah adalah dokumen strategi percepatan penanggulangan kemiskinan di daerah yang digunakan sebagai salah satu pedoman penyusunan rancangan kebijakan pembangunan daerah di bidang percepatan penanggulangan kemiskinan. Percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Banyumas bertujuan untuk:

- a. Mempercepat penurunan jumlah warga miskin.
- b. Meningkatkan kemampuan dasar dan kemampuan berusaha warga miskin.
- c. Memberikan jaminan perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar.
- d. Meningkatkan partisipasi masyarakat.

- e. Menjamin konsistensi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi dalam penanggulangan kemiskinan.

Strategi percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Banyumas dilakukan dengan cara:

- a. Mengurangi beban pengeluaran warga miskin.
- b. Meningkatkan kemampuan dan pendapatan warga miskin.
- c. Mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro dan kecil.
- d. Mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.

Sedangkan, program penanggulangan kemiskinan Kabupaten Banyumas terdiri dari:

- a. Program penanggulangan kemiskinan berbasis keluarga.
- b. Program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat.
- c. Program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil.
- d. Program-program lainnya yang baik secara langsung ataupun tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin.

Terkait dengan data kemiskinan, persentase penduduk miskin di Kabupaten Banyumas masih berada di atas persentase penduduk miskin di Provinsi Jawa Tengah. Tabel 24 menunjukkan persentase penduduk miskin di Kabupaten Banyumas dan Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2018-2022.

Retrieved from Pemerintah Kabupaten Wonosobo: <https://prokompim.wonosobokab.go.id/storage/files/2/Sambutan%20Februari%202023/21%20FEB,%20SAMBUTAN%20BUPATI%20WONOSOBO%20RAKOR%20TKPK%20KAB%20WONOSOBO%202023.pdf>

Prasojo, E. (2009). Reformasi Kedua-Melanjutkan Estafet Reformasi. Jakarta: Salemba Humanika.

Putera, R. E. (2009). E-Government dan Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Publik di Daerah. DEMOKRASI Vol. 8, No. 1.

Sari, Y. A. (2021). Pengaruh Upah Minimum, Tingkat Pengangguran Terbuka, dan Jumlah Penduduk terhadap Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah. Equilibrium Vol. 10, No. 2, 121-130.

Singh, P. K., & Chudasama, H. (2020). Evaluating Poverty Alleviation Strategies in a Developing Country. PLoS ONE Vol. 15, No. 1, 1-23.

Wahyu, T. (2009). Kemiskinan dan Bagaimana Memeranginya. AKSES: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Vol. 4, No. 7, 56-65.

Wan, G., Hu, X., & Liu, W. (2021). China's Poverty Reduction Miracle and Relative Poverty: Focusing on the Roles of Growth and Inequality. China Economic Review Vol. 68.

Widjaja, H. W. (2011). Otonomi Daerah dan Daerah Otonom. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Yusriadi, & Misnawati. (2017). Reformasi Birokrasi dalam Pelayanan Publik. Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik Vol. 7, No. 2, 99-108.

Yusuf, S. Y., & Ma'mun. (2020). Reformasi Birokrasi dalam Peningkatan Kualitas Implementasi Reformasi Birokrasi (Teknis Substantif Administratif Bidang Reformasi Birokrasi). Depok: BPSDM KUMHAM Press.

BAB 9
PENGEMBANGAN
DESA WISATA
SEBAGAI STRATEGI
PENGENTASAN
KEMISKINAN DI
PEDESAAN

Hikmah Nuraini

A. Pendahuluan

Indonesia dapat dikatakan sebagai Negara desa, dimana sebagian besar wilayahnya adalah desa, membangun Indonesia berarti membangun desa (Antlov, 2003). Data yang tercatat pada buku induk kode dan data wilayah administrasi pemerintahan per provinsi, kabupaten/kota dan kecamatan seluruh Indonesia 2023 yang diterbitkan Kementerian Dalam Negeri tercatat jumlah desa mencapai 72.944 desa. Dari jumlah tersebut 32.000 desa merupakan desa yang masuk kategori membutuhkan perhatian khusus Sementara jumlah kelurahan di Indonesia hanya berjumlah 8.309. Oleh karena itu pembangunan perdesaan memiliki peran yang sangat strategis dalam menggerakkan perekonomian rakyat dan juga dalam hal pendistribusian kesejahteraan (*distribution of welfare*) (Todaro, 2000). Untuk pendistribusian kesejahteraan masyarakat di desa tidak hanya bertujuan pada peningkatan pendapatan dan kesejahteraan sosial semata tapi lebih pada meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi untuk menggerakkan seluruh potensi dan sumber daya yang ada di desa.

Pembangunan pada hakekatnya bertujuan membangun kemandirian, termasuk pembangunan pedesaan. Membangun kemandirian suatu wilayah harus didasarkan pada potensi lokalitas yang ada, sehingga pembangunan yang dilakukan adalah suatu proses yang adaptif kreatif (Suparjan & Hempri, 2003). Bahwa pembangunan harus dilihat sebagai proses untuk meningkatkan kapasitas suatu wilayah dan masyarakatnya agar mampu beradaptasi secara kreatif terhadap perkembangan lingkungannya.

Salah satu misi pemerintah adalah membangun daerah pedesaan yang dapat dicapai melalui pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan produktivitas dan keanekaragaman usaha pedesaan, ketersediaan sarana dan fasilitas untuk mendukung ekonomi pedesaan, membangun dan memperkuat institusi yang mendukung rantai produksi dan pemasaran, serta mengoptimalkan sumber daya sebagai dasar pertumbuhan ekonomi pedesaan (Madekhan, 2007) Tujuannya, adalah untuk memberi peluang bagi kemampuan daerah dan pedesaan sebagai tulang punggung

ekonomi regional dan nasional.

Saat ini kemiskinan masih menjadi masalah penting dalam pembangunan nasional Indonesia, Kondisi ini bisa dilihat dari masih banyaknya jumlah penduduk miskin yang ada. Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan, pada bulan Maret 2023, jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 25,9 juta orang. Berdasarkan tempat tinggal, penduduk miskin paling banyak berada di pedesaan yaitu 12,22% sedangkan di perkotaan tercatat sebanyak 7,29 %. Sementara itu BPS Jawa Tengah mencatat pada Maret 2023 jumlah penduduk miskin mencapai 3,79. Dari jumlah tersebut, untuk angka kemiskinan di wilayah pedesaan mencapai 36,2 orang atau 11,8%, sedangkan angka kemiskinan untuk wilayah perkotaan mencapai 30,5 ribu orang atau 9,78 %. Berdasarkan data diatas dapat diketahui bahwa jumlah penduduk miskin di desa masih lebih banyak dibandingkan dengan diperkotaan. Selain itu, sekitar 68 juta penduduk Indonesia berada pada posisi rentan untuk jatuh miskin. Pendapatan mereka hanya sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan keluarga miskin. Guncangan ekonomi seperti jatuh sakit, bencana atau kehilangan pekerjaan, dengan mudah dapat membuat mereka kembali jatuh miskin.

Kemiskinan di pedesaan merupakan tantangan serius yang terus dihadapi oleh banyak negara, termasuk Indonesia. Upaya untuk mengentaskan kemiskinan memerlukan strategi yang holistik dan berkelanjutan. Salah satu pendekatan yang menarik dan potensial adalah pengembangan desa wisata. Desa wisata memiliki potensi untuk memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian local, menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Desa wisata tidak hanya menawarkan potensi peningkatan ekonomi, tetapi juga mampu memperkuat ikatan sosial dan budaya masyarakat pedesaan.

Pengembangan desa wisata merupakan salah satu bentuk percepatan pembangunan desa secara terpadu untuk mendorong transformasi sosial, budaya, dan ekonomi desa (Dirjen Pariwisata, 2018). Oleh karena itu, tidak mengherankan jika hampir semua desa di Indonesia berupaya mengembangkan sektor ini. Mengembangkan desa wisata bukan hanya tentang menarik kunjungan wisatawan; ini juga melibatkan pemberdayaan masyarakat setempat. Dengan

melibatkan mereka dalam proses pengelolaan, pemasaran, dan pembangunan infrastruktur pariwisata, masyarakat pedesaan dapat menjadi mitra yang berdaya dalam menciptakan dampak positif jangka panjang. Oleh karena itu, upaya ini juga memberikan kesempatan bagi masyarakat setempat untuk terlibat aktif dalam mengelola sumber daya lokal dan menciptakan berbagai peluang usaha.

Desa wisata tidak hanya menjadi destinasi wisata biasa; mereka juga merupakan pusat kehidupan masyarakat lokal. Dengan menggabungkan aspek pariwisata, keberlanjutan ekonomi, dan pelestarian budaya, desa wisata dapat menjadi katalisator penting dalam pengentasan kemiskinan. Melalui pendekatan ini, diharapkan masyarakat pedesaan dapat mengalami perbaikan kondisi ekonomi, peningkatan akses pendidikan dan kesehatan, serta pelestarian warisan budaya.

Dalam pengembangan desa wisata ini diperlukan kesiapan sumber daya manusia agar mereka tidak menjadi penonton di rumah sendiri. Oleh karena itu, tiap daerah dan desa perlu mencermati potensi yang dimiliki untuk diangkat dan dikembangkan agar memberikan nilai tambah serta menghasilkan produktivitas yang tinggi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

B. Desa Wisata sebagai Solusi Pengentasan Kemiskinan

Kemiskinan di pedesaan bukan hanya sekadar masalah ekonomi, tetapi juga mencakup aspek-aspek sosial, budaya, dan lingkungan. Pengembangan desa wisata muncul sebagai solusi inovatif yang tidak hanya dapat meningkatkan perekonomian pedesaan, tetapi juga membawa dampak positif. Desa wisata menjadi solusi pengentasan kemiskinan dengan berbagai manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat setempat. Sehingga pengembangan desa wisata memiliki potensi besar untuk membantu mengatasi masalah kemiskinan di pedesaan.

Pengembangan pariwisata pedesaan didorong oleh tiga faktor. Pertama, wilayah pedesaan memiliki potensi alam dan

budaya yang relatif lebih otentik daripada wilayah perkotaan, masyarakat pedesaan masih menjalankan tradisi dan ritual-ritual budaya dan topografi yang cukup serasi. Kedua, wilayah pedesaan memiliki lingkungan fisik yang relatif masih asli atau belum banyak tercemar oleh ragam jenis polusi dibandingkan dengan kawasan perkotaan. Ketiga, dalam tingkat tertentu daerah pedesaan menghadapi perkembangan ekonomi yang relatif lambat, sehingga pemanfaatan potensi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat lokal secara optimal merupakan alasan rasional dalam pengembangan pariwisata pedesaan.

Pengembangan Desa Wisata adalah sebagai salah satu produk wisata alternatif yang dapat memberikan dorongan bagi pembangunan pedesaan yang berkelanjutan serta memiliki prinsip pengelolaan antara lain :

- a. Memanfaatkan sarana dan prasarana masyarakat setempat;
- b. Menguntungkan masyarakat setempat;
- c. Berskala kecil untuk memudahkan terjalinnya hubungan timbal balik dengan masyarakat setempat;
- d. Melibatkan masyarakat setempat;
- e. Menerapkan pengembangan produk wisata pedesaan.

Pariwisata merupakan salah satu sektor ekonomi yang memiliki potensi besar dalam kontribusi terhadap pengurangan kemiskinan. Namun, seringkali model pariwisata konvensional kurang memperhatikan kesejahteraan dan partisipasi masyarakat lokal. Oleh karena itu, pengembangan pariwisata berbasis komunitas menjadi sebuah pendekatan yang penting untuk memastikan bahwa manfaat dari industri pariwisata benar-benar dirasakan oleh masyarakat lokal (Jamal,1995). Untuk itu dalam pengelolaan dan pengembangan pariwisata berbasis komunitas dapat diterapkan pada pengembangan desa wisata. Desa wisata adalah suatu konsep pengembangan pariwisata di area pedesaan yang dirancang untuk menarik wisatawan dengan menawarkan pengalaman yang autentik, beragam, dan terintegrasi dengan kehidupan dan kebudayaan lokal. Desa wisata harus berorientasi pada tiga hal

yaitu : pemberdayaan masyarakat, penciptaan lapangan kerja dan pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik (World Bank,2019).

1. Pemberdayaan Ekonomi Lokal

Pemberdayaan ekonomi lokal dalam sektor pariwisata memiliki peran krusial dalam menciptakan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Salah satu aspek utama dari pemberdayaan ini adalah memberikan kesempatan kepada masyarakat setempat untuk terlibat secara langsung dalam industri pariwisata. Dengan memberdayakan masyarakat lokal untuk menjadi pemilik usaha, pemandu wisata, atau penyedia barang dan jasa lainnya, akan tercipta peluang ekonomi yang lebih merata.

Desa wisata memberikan peluang untuk meningkatkan pendapatan masyarakat lokal melalui peningkatan sektor pariwisata. Produk lokal, kerajinan tangan, dan kuliner khas dapat dijual kepada wisatawan, sehingga menciptakan sumber pendapatan baru. Selain itu Keterlibatan aktif masyarakat setempat dalam pengelolaan dan pengembangan desa wisata sangat penting sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat untuk berperan aktif dalam kegiatan pariwisata dan mendapatkan manfaat ekonomi dari industri tersebut. Melibatkan masyarakat setempat dalam pengelolaan dan pemasaran desa wisata akan memberikan mereka kesempatan untuk mengembangkan keterampilan baru dan memiliki peran aktif dalam meningkatkan ekonomi desa.

2. Penciptaan Lapangan Kerja

Pengembangan desa wisata akan menciptakan beragam lapangan kerja, seperti pemandu wisata, pengelola homestay, penjual oleh-oleh, dan petugas kebersihan. Dengan kata lain dengan berkembangnya pariwisata akan mengurangi ketergantungan ekonomi pada sektor tertentu, seperti pertanian atau industri tertentu. Sehingga diversifikasi ekonomi dapat dikembangkan di pedesaan dan dapat meningkatkan ketahanan ekonomi mereka. Hal ini dapat mengurangi tingkat pengangguran di pedesaan.

3. Infrastruktur dan Fasilitas Publik

Peningkatan infrastruktur, seperti jalan raya, sanitasi, dan

sarana air bersih, merupakan langkah penting untuk mendukung perkembangan desa wisata. Ini tidak hanya akan meningkatkan pengalaman wisatawan tetapi juga kesejahteraan masyarakat setempat. Sebagian dari pendapatan yang diperoleh dari sektor pariwisata dapat dialokasikan untuk meningkatkan fasilitas pendidikan dan kesehatan di pedesaan, yang pada gilirannya akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Fasilitas dan aksesibilitas wisata termasuk didalamnya adalah prasarana dan sarana pariwisata. Prasarana pariwisata adalah semua fasilitas utama atau dasar yang memungkinkan kepariwisataan dapat hidup dan berkembang dalam rangka memberikan pelayanan kepada para wisatawan.

Pengembangan pariwisata pedesaan merupakan dampak dari adanya perubahan minat wisatawan terhadap daerah destinasi wisata. Tumbuhnya tren dan motivasi perjalanan wisata minat khusus yang menginginkan wisata yang kembali ke alam, interaksi dengan masyarakat lokal, serta tertarik untuk mempelajari budaya dan keunikan lokal sehingga mendorong pengembangan wisata pedesaan.

C. Pengembangan Desa Wisata

Desa Wisata merupakan suatu kawasan pedesaan yang menawarkan keseluruhan suasana yang mencerminkan keaslian pedesaan baik dari kehidupan sosial ekonomi, sosial budaya, adat istiadat, keseharian, memiliki arsitektur bangunan dan struktur tata ruang desa yang khas atau kegiatan perekonomian yang unik dan menarik serta mempunyai potensi untuk di kembangkannya berbagai komponen kepariwisataan, misalnya atraksi, akomodasi, makanan-minuman, cinderamata, dan kebutuhan wisata lainnya. Desa wisata adalah suatu kawasan pedesaan yang dikembangkan secara khusus untuk menarik kunjungan wisatawan dengan menonjolkan daya tarik budaya, alam, sejarah, atau kearifan lokal. Konsep desa wisata berfokus pada pemanfaatan potensi lokal dan partisipasi aktif masyarakat setempat dalam mengelola dan

Gunn, Clare A, *Tourism Planing: Basic, Concept, Case*. (New York: Routlegde, (2002),5-9.

Hall, C. M., & Page, S. J. (2009). *The Geography of Tourism and Recreation: Environment, Place, and Space*. Routledge.

Jamal, T., & Getz, D. (1995). Collaboration theory and community tourism planning. *Annals of Tourism Research*, 22(1)

Madekhan, A. (2007). *Orang Desa Anak Tiri Perubahan* (S. Arief (ed.) Averroes Press.

Ritchie, J. R. B., & Crouch, G. I. (2003). *The Competitive Destination: A Sustainable Tourism Perspective*. CABI Publishing.

Suparjan, & Hempri, S. (2003). *Pengembangan Masyarakat dari Pembangunan Sampai Pemberdayaan*. Aditya Media.

Sutomo dan S F Salihayati, *Geodukasi*, volume 4 nomor 1Maret 2015

Timothy, D. J., & Nyaupane, G. P. (2009). *Cultural heritage and tourism in the developing world: A regional perspective*. Routledge.

Todaro, M. P. (2000). *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga* (Y. Sumiharti & H. Munandar (eds.); 7 Terjemah). Erlangga.

Wahab, Saleh, *Manajemen Kepariwisataaan*, (Jakarta, PT Pradnya Paramita,)

World Bank. (2019). *Tourism and Poverty Reduction: Pathways to Prosperity*. Washington, DC: World Bank.

DILINDUNGI UU NO. 28 TAHUN 2014
DILARANG DIGANDAKAN DAN DISEBARLUASKAN

BAB 10
PERAN INOVASI
DAN KREATIVITAS
APARATUR DESA
DALAM PENGENTASAN
KEMISKINAN

Wahyuningrat

A. Pendahuluan

Kemiskinan masih menjadi masalah sosial yang mendesak di Indonesia (Idrus & Rosida, 2020). Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin pada September 2022 mencapai 26,16 juta jiwa atau setara dengan 9,71% total penduduk Indonesia (Hidayat et al., 2022). Angka tersebut mengalami peningkatan dibandingkan September 2021 yang berjumlah 26,10 juta orang (BPS, 2022). Tingginya angka kemiskinan menunjukkan bahwa upaya penanggulangan kemiskinan di Indonesia terus menghadapi berbagai tantangan (Purwono et al., 2021).

Salah satu penyebab tingginya angka kemiskinan adalah kesenjangan pembangunan antarwilayah (Suryadarma, Sumarto & Suryahadi, 2006). Mayoritas populasi yang mengalami kemiskinan di daerah perdesaan dan perbatasan yang secara relatif mengalami keterbelakangan dibandingkan dengan wilayah perkotaan (Kadir & Amalia, 2016; Arham, Fadhli & Dai, 2020). Berdasarkan penelitian Hutabarat, Syahnur & Dawood (2023) seiring dengan data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2022, tingkat kemiskinan di daerah perdesaan mencapai 13,20%, yang merupakan angka yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat kemiskinan di wilayah perkotaan yang hanya sebesar 5,89%. Kondisi di atas menunjukkan bahwa kemiskinan di perdesaan memerlukan perhatian khusus dalam upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia.

Aparatur desa sebagai garda terdepan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa mempunyai peranan penting dalam upaya pengentasan kemiskinan di perdesaan (Seroka, 1989). Namun kapasitas dan kemampuan aparatur desa dalam merencanakan dan melaksanakan program pengentasan kemiskinan masih terbatas (Tomashuk, 2017). Shpykuliak & Sakovska (2020) dalam penelitiannya menyatakan perlunya inovasi dan kreativitas di kalangan aparatur desa sangat penting dalam merancang dan melaksanakan program yang ditargetkan untuk mengentaskan kemiskinan di perdesaan.

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kapasitas aparatur desa dan kemiskinan di lapangan saling berkaitan satu sama lain. Penelitian yang dilakukan Sutiyo dan Maharjan (2011) mengungkapkan bahwa kemiskinan di perdesaan disebabkan oleh permasalahan ekonomi seperti pengangguran, rendahnya produktivitas, dan terbatasnya modal. Penelitian lain yang dilakukan oleh Putra (2022) menyimpulkan bahwa kapasitas aparatur desa dalam perencanaan program pengentasan kemiskinan masih lemah karena keterbatasan pengetahuan dan keterampilan.

Selain itu, beberapa penelitian telah dilakukan mengenai peningkatan kapasitas perangkat desa. Penelitian yang dilakukan oleh Pahrudin (2010) menunjukkan bahwa pelatihan dan pendampingan direkomendasikan untuk meningkatkan keterampilan perencanaan program aparatur desa. Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Ishom et.al (2005) menyarankan penggunaan pendekatan pemberdayaan masyarakat untuk merangsang ide dan inisiatif lokal dalam pengentasan kemiskinan.

Meskipun terdapat upaya untuk meningkatkan kapasitas aparatur desa, namun masih kurangnya diskusi khusus yang mengkaji peningkatan inovasi dan kreativitas aparatur desa dalam merancang program pengentasan kemiskinan di perdesaan. Tujuan dari tulisan ini adalah untuk mendiskusikan alternatif pengentasan kemiskinan perdesaan melalui inovasi dan kreativitas aparatur desa. Untuk itu, maka dalam tulisan ini akan diperkuat dengan analisis situasi kemiskinan di perdesaan di Indonesia pada umumnya serta faktor-faktor yang berkontribusi terhadap permasalahan tersebut. Selanjutnya ditambahkan dengan analisis kapasitas dan peran aparatur desa dalam perencanaan dan pelaksanaan program pengentasan kemiskinan perdesaan. Tantangan dan hambatan yang dihadapi aparatur desa dalam merancang program inovatif pengentasan kemiskinan perdesaan akan menjadi diskusi selanjutnya. Pada akhirnya tulisan ini akan merumuskan model peningkatan kapasitas inovasi dan kreativitas aparatur desa dalam merencanakan program pengentasan kemiskinan yang efektif dan tepat sasaran di tingkat desa. Berdasarkan rangkaian analisis tersebut, akhirnya tulisan ini akan memberikan rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan peran inovasi dan kreativitas

aparatur desa dalam mengentaskan kemiskinan di perdesaan. Karena itulah tulisan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun praktis. Secara kontekstual, tulisan ini memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengembangan praktik-praktik administrasi publik terutama terkait dengan manajemen sumber daya manusia dan inovasi sektor publik. Secara praktis diharapkan dapat digunakan sebagai masukan bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas inovasi dan kreativitas aparatur desa.

Perlunya inovasi dan kreativitas di kalangan aparatur desa sangat penting dalam merancang program pengentasan kemiskinan yang efektif dan sesuai dengan konteks lokal (Hjorth, 2003). Aparatur desa yang inovatif dan kreatif mampu mengidentifikasi akar permasalahan kemiskinan di perdesaan dan merancang solusi tepat sasaran yang memanfaatkan potensi lokal desa (Khavul & Bruton, 2013). Beberapa penelitian mengindikasikan bahwa efektivitas program menimbulkan kemiskinan sering kali terhambat oleh kurangnya partisipasi dan inisiatif dari para pemangku kepentingan di tingkat desa. Oleh karena itu, tulisan ini meyakini bahwa peningkatan kapasitas inovasi dan kreativitas aparatur desa akan berdampak positif terhadap efektivitas program pengentasan kemiskinan di perdesaan. Semakin inovatif dan kreatif aparatur desa, maka program pengentasan kemiskinan desa yang dihasilkan akan semakin kontekstual dan tepat sasaran, sesuai dengan kondisi spesifik masing-masing desa.

Beberapa faktor yang diperkirakan dapat meningkatkan inovasi dan kreativitas aparatur desa meliputi pendidikan dan pelatihan, paparan pengalaman dari desa-desa lain, serta dorongan dan motivasi yang diberikan oleh pemerintah daerah. Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji faktor-faktor tersebut di atas dan merumuskan model yang paling efektif untuk meningkatkan kapasitas inovasi dan kreativitas aparatur desa. Dengan demikian, tulisan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam kebijakan pengembangan yang bertujuan untuk meningkatkan peran aparatur desa dalam upaya pengentasan kemiskinan di

Indonesia. Hal ini diharapkan dapat dicapai melalui peningkatan kapasitas dalam inovasi dan kreativitas.

B. Manajemen Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan aset yang paling berharga yang dimiliki oleh organisasi. Mereka memiliki peran sebagai makhluk sosial yang adaptif dan transformatif yang mampu mengelola dirinya sendiri dan sekaligus mampu berkontribusi baik terhadap organisasi dalam mencapai tujuan. Dengan demikian sumber daya manusia merupakan bagian integral yang tidak terpisahkan dari perencanaan strategis organisasi. Manusia adalah faktor yang paling strategis dalam kehidupan sebuah organisasi. Oleh karena itu, dalam pengelolaannya harus diperlakukan sebagai human capital. Morling & Yakhlef (1999), yang menentukan kesuksesan suatu organisasi adalah kemampuan organisasi tersebut mengelola aset pengetahuan dalam hal ini yang dimiliki oleh sumber daya manusia. Setiap organisasi terutama organisasi publik saat ini dituntut memiliki keunggulan kompetitif. Keunggulan kompetitif tersebut hanya diperoleh melalui inovasi-inovasi kreatif yang hanya dimiliki oleh sumber daya manusia.

Human capital sesungguhnya manusia itu sendiri yang secara personal dipinjamkan kepada organisasi dengan kapabilitas individunya, komitmen, pengetahuan, keterampilan, motivasi, kompetensi, kreativitas, pengalaman pribadi, inovasi, ide-ide, energi dan atribut lainnya dari sumber daya manusia. Steward (1998), human capital merupakan life blood dalam modal intelektual dan sumber inovasi, tetapi komponen ini memang sulit diukur. Human capital mencerminkan kemampuan kolektif organisasi untuk menghasilkan solusi terbaik berdasarkan pengetahuan yang dimiliki oleh orang-orang yang ada dalam organisasi. Kinerja organisasi akan meningkat jika organisasi mampu menggunakan pengetahuan yang dimiliki pegawainya.

Davenport (1999), pegawai seharusnya tidak diperlakukan sebagai aset pasif yang bisa dibeli, dijual, dan diganti begitu saja oleh pemilik organisasi, namun perlu diperhatikan bahwa pegawai

secara aktif memiliki kontrol terhadap kehidupan kerjanya. Pegawai khususnya yang berpendidikan dapat menentukan dirinya sendiri bahwa dirinya adalah seorang agen yang bebas yang dapat menentukan bagaimana dan di mana mereka dapat menginvestasikan minat, bakat, waktu, dan energinya. Teori human capital berasumsi bahwa pegawai adalah aset dan organisasi akan selalu investasi kepada pegawainya, maka pegawai akan menghasilkan return bagi organisasi. Human capital akan menghasilkan keunggulan kompetitif karena merupakan sumber daya yang dimiliki organisasi dan tidak dapat ditiru atau diambil alih oleh pesaing. Boxall (1996), menyebutnya sebagai human capital advantage yaitu superioritas sumber daya manusia suatu organisasi dibanding organisasi lainnya.

Mayo (2000), mengidentifikasi 5 (lima) komponen human capital yaitu: (1) individual capability yakni meliputi pengetahuan, keterampilan, pengalaman, jaringan, kemampuan untuk mencapai hasil, potensi untuk berkembang dan apa yang mereka bawa ke dalam pekerjaan dari kehidupan mereka; (2) individual motivation, meliputi aspirasi, ambisi dan dorongan, motivasi kerja dan produktivitas; (3) leadership, meliputi kejelasan visi tentang manajemen puncak dan kemampuan mereka untuk berkomunikasi dan berperilaku dengan cara yang konsisten; (4) the organization climate, meliputi budaya organisasi, kebebasan berinovasi, keterbukaan, fleksibilitas, dan saling menghormati antarindividu; dan (5) workgroup effectiveness, meliputi dukungan, saling menghormati, berbagi dalam tujuan bersama dan nilai-nilai. Kelompok kerja lebih dikenal dengan tim kerja. Dalam tim kerja akan terjalin hubungan yang baik antaranggota tim, tetapi juga mungkin akan muncuk konflik di dalam tim kerja.

Sementara itu Ancok (2003), membagi komponen human capital lebih rinci lagi yaitu: (1) modal intelektual; (2) modal emosional; (3) modal sosial; (4) modal ketabahan; (5) modal moral; dan (6) modal kesehatan. Human capital merupakan kombinasi dari pengetahuan, keterampilan, inovasi, dan kemampuan seseorang untuk menjalankan tugasnya sehingga dapat menciptakan suatu nilai untuk mencapai tujuan (Maholtra (2003); Bontis (2002). Babalola (2003) menegaskan bahwa investasi human capital sangat beralasan

karena: (1) generasi baru harus diberikan pengetahuan yang relevan yang terakumulasi dari generasi sebelumnya; (2) generasi baru harus diajarkan bagaimana seharusnya pengetahuan digunakan untuk mengembangkan produk baru, menawarkan proses dan metode produksi yang baru dan memberikan pelayanan; dan (3) seseorang harus terus dipacu untuk mengembangkan seluruh ide, produk, proses dan metode melalui pendekatan yang kreatif.

Dari perspektif sumber daya manusia strategis, Armstrong (2008) menyebutkan ada 8 konsep yang mendasari perspektif ini:

1. Competitive advantage, yaitu kemampuan bersaing dari sebuah organisasi melalui penciptaan nilai bagi pengguna layanannya. Oleh karena itu strategi bersaing bagi sebuah organisasi sangat penting dan harus dipilih yang paling tepat.
2. Distinctive capabilities, yaitu peluang organisasi untuk mempertahankan keunggulan kompetitif ditentukan oleh kemampuan mereka yaitu kemampuan khas organisasi. Kemampuan khas berbeda dengan kemampuan yang dapat direproduksi. Kemampuan khas adalah kemampuan unik yang tidak dapat ditiru oleh pesaing dan hanya dapat ditiru dengan susah payah.
3. Strategic intent, dapat berupa pernyataan visi atau misi yang sangat luas dan dikonkritkan ke dalam tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam jangka panjang. Urutan strategic intent: (1) visi; (2) misi; (3) tujuan khusus yang dioperasionalkan ke dalam; (4) tujuan strategis.
4. Strategic capability, adalah kemampuan sebuah organisasi untuk mengembangkan dan menerapkan strategi yang akan mencapai persaingan yang berkelanjutan. Organisasi yang memiliki kemampuan strategis tingkat tinggi, mereka tahu kemana akan pergi dan tahu bagaimana mereka akan sampai ke sana.
5. The resource-based view, bahwa kapabilitas strategis suatu organisasi tergantung pada kemampuan sumber dayanya. Keunggulan kompetitif yang berkelanjutan berasal dari

perolehan dan penggunaan yang efektif dari kumpulan sumber daya khas yang pesaing tidak dapat meniru.

6. Strategic management, serangkaian keputusan dan tindakan yang menghasilkan perumusan dan implementasi strategi yang dirancang untuk mencapai tujuan organisasi.
7. Strategic goals, tujuan organisasi yang menunjukkan organisasi tersebut ingin menjadi seperti apa. Biasanya diwujudkan dalam tujuan yang bersifat umum.
8. Strategic plans, rencana strategis adalah ekspresi formal tentang bagaimana sebuah organisasi bermaksud untuk mencapai tujuan strategisnya.

Mengingat pentingnya keberadaan SDM dalam organisasi, maka SDM harus dimanajemeni sebaik mungkin. Armstrong (2008), mendefinisikan manajemen sumber daya manusia merupakan sebuah pendekatan yang strategis dan koheren untuk mengelola aset yang paling berharga bagi sebuah organisasi yakni orang-orang, baik secara individu maupun kelompok yang berkontribusi terhadap pencapaian tujuan. Sementara itu Boxall (2007) menyebut manajemen sumber daya manusia merupakan the management of work and people towards desired ends. Manajemen sumber daya manusia meliputi pendayagunaan, pengembangan, penilaian, pemberian balas jasa, dan pengelolaan individu anggota organisasi atau kelompok kerja (Simamora,1999). Begitu juga menurut Mangkunegara (2002), manajemen sumber daya manusia merupakan suatu perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengadaan, pengembangan, pemberian balas jasa, pengintegrasian, pemeliharaan dan pemisahan tenaga kerja dalam rangka mencapai tujuan organisasi.

Tujuan manajemen sumber daya manusia: (1) organizational effectiveness (Cappelli & Crocker, 1996); (2) human capital management (Bontis et al, 1999; Becker et al 1997); (3) knowledge management (Scarborough et al, 1997); (4) reward management (Armstrong, 2006); (5) employee relations (Armstrong, 2006);

(6) meeting diverse needs (Armstrong, 2006). Sedarmayanti merumuskan tujuan manajemen sumber daya manusia paling tidak ada 6 tujuan:

1. Memberi saran kepada manajemen tentang kebijakan sumber daya manusia untuk memastikan organisasi memiliki sumber daya manusia bermotivasi tinggi dan berkinerja tinggi, dilengkapi sarana untuk menghadapi perubahan.
2. Memelihara dan melaksanakan kebijakan dan prosedur sumber daya manusia untuk mencapai tujuan organisasi.
3. Mengatasi krisis dan situasi sulit dalam hubungan antarpegawai agar tidak ada gangguan dalam mencapai tujuan organisasi.
4. Menyediakan sarana komunikasi antarpegawai dan manajemen organisasi.
5. Membantu perkembangan arah dan strategi organisasi secara keseluruhan dengan memperhatikan aspek sumber daya manusia.
6. Menyediakan bantuan dan menciptakan kondisi yang dapat membantu manajer lini dalam mencapai tujuan.

Fungsi-fungsi manajemen sumber daya manusia menurut Pynes (2009) meliputi rekrutmen, seleksi, pelatihan dan pengembangan, kompensasi dan benefit, retensi, evaluasi, promosi pegawai, dan hubungan pekerjaan. Sementara itu Flippo (1995) merinci fungsi manajemen sumber daya manusia menjadi lebih ringkas yaitu pengadaan, pengembangan, kompensasi, integrasi, pemeliharaan dan pemutusan hubungan kerja. Sebaliknya Hasibuan (2014) membagi fungsi manajemen sumber daya manusia sangat rinci:

1. Perencanaan yaitu merencanakan sumber daya manusia secara efektif dan efisien agar sesuai dengan kebutuhan organisasi dalam membantu terwujudnya tujuan.
2. Pengorganisasian adalah kegiatan untuk mengorganisasi karyawan dengan menetapkan pembagian kerja, hubungan kerja, delegasi wewenang, integrasi, dan koordinasi dalam bagan organisasi.

3. Pengarahan adalah kegiatan mengarahkan semua karyawan agar mau bekerja sama dan bekerja efektif serta efisien dalam membantu tercapainya tujuan organisasi karyawan, dan masyarakat.
4. Pengendalian, adalah kegiatan mengendalikan semua karyawan, agar menaati peraturan-peraturan organisasi dan bekerja sesuai dengan rencana.
5. Pengadaan adalah proses penarikan, seleksi, penempatan, orientasi, dan induksi untuk mendapatkan karyawan yang sesuai dengan kebutuhan organisasi.
6. Pengembangan, adalah proses peningkatan keterampilan teknis, teoritis, konseptual, dan moral karyawan melalui pendidikan dan pelatihan.
7. Kompensasi adalah pemberian balas jasa langsung dan tidak langsung, uang atau barang kepada karyawan sebagai imbalan jasa yang diberikan oleh organisasi.
8. Pengintegrasian, adalah kegiatan untuk mempersatukan kepentingan organisasi dan kebutuhan karyawan, agar tercipta kerja sama yang serasi dan saling menguntungkan.
9. Pemeliharaan adalah kegiatan untuk memelihara atau meningkatkan kondisi fisik, mental, dan loyalitas karyawan, agar mereka tetap mau bekerja sama hingga pensiun.
10. Kedisiplinan merupakan fungsi yang terpenting dan kunci terwujudnya tujuan, karena tanpa disiplin yang baik sulit terwujud tujuan yang maksimal.
11. Pemberhentian adalah putusannya hubungan kerja seseorang dari suatu organisasi, karena keinginan karyawan, keinginan organisasi, kontrak kerja berakhir, pensiun dan sebab-sebab lainnya.

Dalam tulisan ini fungsi yang paling penting adalah fungsi pengembangan sumber daya manusia. Untuk mewujudkan aparatur desa yang inovatif dan kreatif membutuhkan upaya untuk mengembangkan kompetensinya. Pengembangan sumber

daya manusia merupakan disiplin terapan yang relatif baru dan terus berkembang. Gilley & Maycunich (2000), pengembangan sumber daya manusia berkenaan dengan memajukan pengetahuan, keterampilan, kompetensi dan perbaikan perilaku baik pribadi maupun profesional, merefleksikan fokus pada individual dan organisasional yang dihasilkan dari komitmen terhadap sumber daya manusia. Sedangkan Hargreaves & Jarvis (2000), pengembangan sumber daya manusia adalah proses membantu individu untuk mengembangkan potensinya secara optimal. Pengembangan sumber daya manusia adalah: (1) aktivitas pembelajaran yang terorganisir dalam organisasi dalam rangka perbaikan kinerja dan/atau pertumbuhan pribadi dengan tujuan meningkatkan pekerjaan, individual dan/atau organisasi; (2) pengembangan sumber daya manusia meliputi bidang-bidang pelatihan dan pengembangan, pengembangan karier, dan pengembangan organisasi.

Pengembangan sumber daya manusia mencakup bidang-bidang yaitu pengembangan organisasi yang terkait dengan pengembangan staf, deskripsi jabatan, perencanaan dan rekrutmen staf, benefit bagi staf, hubungan industrial, pelatihan dan pengembangan (Hargreaves & Jarvis (2000). Pengembangan sumber daya manusia merupakan kerangka kerja untuk membantu karyawan mengembangkan keterampilan, pengetahuan dan kemampuan secara individual maupun organisasional. Pengembangan sumber daya manusia termasuk peluang-peluang seperti pelatihan, pengembangan karier, pengelolaan dan pengembangan kinerja, coaching, rencana suksesi, identifikasi karyawan utama, dan pengembangan organisasi. Fokus utama pengembangan sumber daya manusia adalah mengembangkan sumber daya manusia unggul sehingga organisasi dan karyawan secara individual dapat melaksanakan pekerjaannya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

C. Inovasi Sektor Publik

Dari sudut pandang konseptual, inovasi didefinisikan sebagai ide, praktik, atau objek yang dianggap baru oleh individu atau unit pengadopsi lainnya (Moussa, McMurray & Muenjhon, 2018). Inovasi berfungsi sebagai mekanisme kunci dalam pembangunan ekonomi

dan sosial. Di sektor publik, inovasi memungkinkan pemerintah memberikan pelayanan publik secara lebih efektif dan efisien. Menurut Nguyen & Hipsher (2018), kreativitas mengacu pada kemampuan menghasilkan ide, pendekatan, atau tindakan baru dan orisinal yang tepat dalam memecahkan masalah. Kreativitas menjadi motor penggerak inovasi di sektor apapun, termasuk sektor publik. Tanpa adanya kreativitas yang menghasilkan gagasan-gagasan baru, proses inovasi akan terhambat. Dalam konteks pemerintahan desa, pemanfaatan inovasi dan kreativitas sangat penting dalam merancang program pengentasan kemiskinan yang efektif dan disesuaikan dengan kondisi spesifik masing-masing desa setempat. Kreativitas aparatur desa akan melahirkan ide-ide baru, sedangkan inovasi memungkinkan ide-ide tersebut diimplementasikan menjadi program atau kebijakan yang efektif (Pansera & Martinez, 2017).

Dari perspektif manajemen sumber daya manusia, upaya peningkatan inovasi dan kreativitas aparatur desa dapat dilakukan melalui pendekatan rekrutmen dan seleksi (West & Farr, 1992). Untuk mengidentifikasi calon pejabat desa yang memiliki potensi kreativitas dan inovasi tinggi, proses rekrutmen perlu dirancang untuk menyaring karakteristik kepribadian seperti kemampuan berpikir kritis, keterampilan memecahkan masalah, dan minat terhadap hal-hal baru (Cummings & Oldham, 1997). Selain itu, proses seleksi juga harus mencakup tes dan wawancara yang menilai aspek kognitif dan kepribadian pelamar, khususnya yang berkaitan dengan kreativitas dan inovasi, bukan hanya mengevaluasi pengetahuan dan keterampilan teknis (Joo, McLean & Yang, 2013). Dengan melalui proses rekrutmen dan seleksi yang cermat, diharapkan dapat memperoleh aparatur desa yang memiliki fokus pada inovasi dan kreativitas yang tinggi.

Pendekatan lain dalam manajemen sumber daya manusia adalah melalui pelatihan dan pengembangan kompetensi aparatur desa yang ada (Gupta & Singhal, 1993). Program pelatihan dapat dirancang khusus untuk meningkatkan keterampilan berpikir kreatif, merangsang munculnya ide-ide baru, dan membekali individu dengan strategi untuk mengimplementasikan ide-ide kreatif menjadi inovasi yang dapat diterapkan (Al-Thehli & Ahamat, 2019). Materi pelatihan juga harus memberikan paparan

kepada aparatur desa mengenai praktik inovasi desa di lokasi lain sehingga dapat menjadi pembelajaran berharga (Dede, 2019). Oleh karena itu, pelatihan dapat berperan sebagai alat yang efektif dalam meningkatkan inovasi dan kreativitas aparatur desa.

Pembentukan lingkungan kerja yang mendukung inovasi dan kreativitas juga penting dari perspektif manajemen sumber daya manusia (Dorenbosch, Engen & Verhagen, 2005). Lingkungan kerja yang fleksibel yang memungkinkan terjadinya eksperimen dan pengambilan risiko, serta menghargai kegagalan sebagai proses pembelajaran, dapat menjadi katalis bagi inovasi dan kreativitas di kalangan pejabat desa (McLean, 2005). Kepemimpinan juga berperan penting dalam memberikan motivasi, dukungan, apresiasi, dan sumber daya untuk eksperimen dan implementasi ide-ide kreatif di kalangan perangkat desa (Ibrahim, Isa & Shahbudin, 2016). Dengan adanya kondisi kerja yang memadai, potensi inovasi dan kreativitas dari aparatur desa dapat lebih mudah diidentifikasi, dieksplorasi, dan dikembangkan.

Sistem kompensasi dan penghargaan yang dirancang dengan baik juga dapat menumbuhkan inovasi dan kreativitas di kalangan aparatur desa (Sugiartana, 2021). Pemberian insentif atau apresiasi kepada aparatur desa yang berhasil menerapkan ide-ide kreatif untuk pengentasan kemiskinan dapat memotivasi munculnya inovasi dan kreativitas. Sebaliknya, sistem promosi berbasis senioritas yang kurang memperhatikan kinerja inovatif perlu diubah untuk memberikan peluang lebih besar bagi aparatur desa yang kreatif dan inovatif untuk menduduki jabatan yang lebih tinggi (Ederer, 2013; Kim & Yoon, 2015). Dengan adanya sistem insentif yang demikian, diharapkan akan terjadi peningkatan signifikan dalam inovasi dan kreativitas yang ditunjukkan oleh aparatur desa.

Pendekatan lain yang relevan adalah keterlibatan dan pemberdayaan aparatur desa dalam proses perencanaan program pengentasan kemiskinan di perdesaan (Triatmanto, Respati & Rachyuningsih, 2014). Partisipasi aktif akan meningkatkan rasa kepemilikan dan komitmen perangkat desa dalam melaksanakan program secara inovatif (Yuan, Yau & Bao, 2019). Keterlibatan awal dalam perencanaan program juga memungkinkan perangkat desa untuk mengintegrasikan ide-ide kreatif mereka ke dalam

program (Hoe et.al, 2018). Oleh karena itu, diperlukan pendekatan manajemen sumber daya manusia yang komprehensif untuk meningkatkan inovasi dan kreativitas aparatur desa sebagai kunci keberhasilan program pengentasan kemiskinan perdesaan yang efektif dan relevan secara kontekstual sesuai dengan kondisi spesifik masing-masing desa.

D. Kondisi Aparatur Desa di Indonesia

Kapasitas aparatur desa di Indonesia saat ini masih menghadapi berbagai tantangan baik dari segi kualitas maupun kompetensinya. Salah satu penyebab utama permasalahan ini adalah tidak efektifnya sistem rekrutmen dan promosi perangkat desa dalam memperoleh sumber daya manusia terbaik (Imbaruddin, 2003; Rodiyah, 2018). Studi yang dilakukan oleh SMERU (2012) menunjukkan bahwa sebagian besar perangkat desa direkrut berdasarkan hubungan kekerabatan dan politik, bukan berdasarkan kualifikasi dan kompetensi yang diperlukan. Akibatnya, terdapat sejumlah besar aparatur desa yang belum memenuhi standar pendidikan, pelatihan, dan keterampilan yang diperlukan untuk menjalankan tugas mereka secara efektif (Nurcholis, Sakti & Rachman, 2019). Oleh karena itu, perlu adanya reformasi sistem rekrutmen dan promosi perangkat desa yang lebih transparan, kompetitif, dan berbasis kualifikasi untuk memperoleh sumber daya manusia penyelenggaraan pemerintahan desa yang berkualitas dan profesional.

Menurut Fajarwati (2019), aparatur desa belum sepenuhnya menunjukkan kemampuan mereka dalam melaksanakan tugas perencanaan pembangunan desa. Ini karena mereka tidak memiliki akses ke pelatihan dan pendidikan terkait perencanaan pembangunan, yang mengakibatkan mereka memiliki keterampilan perencanaan yang rendah. Berdasarkan studi yang dilakukan USAID pada tahun 2015, ditemukan bahwa rata-rata PNS di perdesaan hanya berpendidikan tamatan SMA. Akibatnya, kemampuan mereka dalam analisis data, perumusan program, dan penganggaran masih terbatas. Hanya sebanyak 15,6% dari total aparatur desa yang telah mengikuti pelatihan perencanaan yang diselenggarakan oleh pemerintah (Yunus & Sani, 2017).

Oleh sebab itu, untuk meningkatkan kapasitas aparatur desa dalam perencanaan pembangunan desa, diperlukan pelatihan dan pendampingan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas perencanaan desa.

Aparatur desa belum mencapai kinerja optimal dalam memberdayakan masyarakat perdesaan. Hal ini disebabkan perlunya peningkatan keterampilan fasilitasi dan kepemimpinan aparatur desa agar pemberdayaan masyarakat perdesaan dapat efektif (Sutiyo & Maharjan, 2013). Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan AIPD pada tahun 2016, ditemukan bahwa sebagian besar aparatur desa, yaitu sebanyak 68,2%, memiliki tingkat keterampilan fasilitasi masyarakat yang rendah. Mereka belum mampu memobilisasi partisipasi masyarakat secara efektif dalam perencanaan pembangunan desa (Musrenbang desa) dan kegiatan terkait lainnya (Suswanto et.al, 2019). Karenanya, peningkatan kapasitas kepemimpinan dan fasilitasi perangkat desa diperlukan agar pemberdayaan masyarakat perdesaan dalam pembangunan desa dapat efektif.

Torre & Wallet (2013) dalam penelitiannya menyatakan bahwa tingkat inovasi dan kreativitas dalam pelaksanaan tugas perangkat desa saat ini masih rendah. Fakta tersebut disebabkan oleh kurangnya insentif dan pengakuan dari sistem untuk menghasilkan ide-ide kreatif dan inovatif (Heye, 2006). Berdasarkan survei yang dilakukan KPPOD pada tahun 2018, ditemukan bahwa 78% perangkat desa melaporkan bahwa mereka belum mendapatkan pelatihan berpikir kreatif dan inovatif. Sebanyak 63% responden menyatakan bahwa mereka tidak merasa terstimulasi untuk mengungkapkan ide-ide kreatif oleh atasan mereka (Hatammimi & Andini, 2022). Selanjutnya, penting untuk membangun ekosistem yang mendorong inovasi dan kreativitas di kalangan pejabat desa melalui pelatihan, pengakuan, dan dukungan kepemimpinan, sehingga memungkinkan mereka menghasilkan terobosan baru.

Banyak anggota aparatur desa yang masih belum memiliki pemahaman yang memadai mengenai teknologi informasi dan komunikasi dalam menjalankan tugas-tugas mereka (Sahriyal, Erny & Neswita, 2022). Hal tersebut terjadi karena kurangnya pelatihan dan pendampingan yang berkaitan dengan pemanfaatan

Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) bagi aparatur desa (Jimi, 2019). Penelitian yang dilakukan Prisanda & Febrina (2021) mengungkapkan bahwa hanya 28,7% perangkat desa yang mahir mengoperasikan komputer/laptop untuk keperluan pengolahan data. Sementara itu, sebanyak 13,5% dari populasi tidak memiliki keterampilan dasar dalam bidang teknologi informasi. Oleh karena itu, pelatihan dan pendampingan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) bagi perangkat desa perlu ditingkatkan secara merata, agar mereka dapat memanfaatkan TIK secara efektif dalam pelaksanaan tugas dan pelayanan desa.

Budaya kerja dan etos kerja perangkat desa masih perlu ditingkatkan. Melalui fakta yang ada, dapat diketahui adanya praktik presensi fiktif yang masih ada, ketidakefektifan jam kerja kantor, dan rendahnya produktivitas dari staf desa (Marota & Alipudin, 2019). Menurut laporan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tahun 2020, terdapat sebanyak 15,7% aparat desa yang terlibat dalam praktik presensi fiktif. Sementara itu, penelitian yang dilakukan Kementerian Dalam Negeri (2016) mengungkapkan bahwa rata-rata jam kerja efektif perangkat desa hanya sebesar 56,7% dari total jam kerja resmi (Maemunah, Pertiwi & Yulawati, 2023). Berdasarkan hal tersebut, perlu adanya upaya sistematis dan komprehensif untuk melakukan reformasi budaya aparatur desa guna meningkatkan produktivitas dan integritas. Hal ini dapat dicapai melalui penguatan sistem pemantauan dan penerapan mekanisme reward dan punishment.

Komitmen untuk memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat perdesaan masih perlu ditingkatkan. Terlihat dari adanya budaya pelayanan dan prioritas terhadap kepentingan masyarakat desa yang belum sepenuhnya diterapkan oleh sebagian aparatur desa (Hidayati, 2018). Menurut penelitian yang dilakukan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN) pada tahun 2018, ditemukan bahwa hanya 19,2% aparatur desa yang memberikan layanan dengan dedikasi penuh. Sebanyak 41,5% masyarakat tetap memberikan layanan dengan sikap apatis dan enggan (Hidayati, Febriani & Djasuli, 2022). Oleh sebab itu, budaya pelayanan prima harus secara konsisten diinternalisasikan pada aparatur desa melalui kampanye, pelatihan budaya kerja, dan proses seleksi

berbasis integritas agar dapat menumbuhkan komitmen yang kuat dalam melayani masyarakat perdesaan secara maksimal.

E. Peran Penting Aparatur Desa dalam Pengentasan Kemiskinan

Aparatur desa mempunyai peranan penting dalam upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia. Karena aparatur desa berperan sebagai garda terdepan dalam melaksanakan program dan kebijakan untuk mengurangi kemiskinan di tingkat desa (Andrianto et.al, 2006). Namun peran strategis perangkat desa belum sepenuhnya optimal karena keterbatasan kapasitas dan kompetensi. Penelitian yang dilakukan UNDP (2016) mengungkapkan bahwa hanya 21,3% aparat desa yang memiliki pemahaman komprehensif tentang konsep pengentasan kemiskinan. Konsekuensinya, banyak program yang tidak mencapai target yang diinginkan (Azhari et.al, 2022). Hasilnya, peningkatan kapasitas aparatur desa dalam upaya mengurangi kemiskinan melalui program pelatihan dan pendampingan menjadi suatu kebutuhan yang sangat penting agar mereka dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka dengan efektif (Gaspersz, 2023).

Aparatur desa berperan dalam melakukan kajian kemiskinan di desanya masing-masing untuk mengidentifikasi akar permasalahan dan merumuskan solusi yang tepat. Namun kemampuan analisis data aparatur desa mengenai profil kemiskinan desa masih kurang (Putra, 2022). Kajian yang dilakukan SMERU (2014) menunjukkan bahwa hanya 17,6% aparatur desa yang rutin melakukan pemetaan kemiskinan rumah tangga. Konsekuensinya, banyak program yang tidak memiliki validitas berbasis data (Wicaksana et.al, 2019). Oleh karena itu, peningkatan kapasitas aparatur desa dalam melakukan penilaian kemiskinan desa menjadi suatu hal yang sangat penting. Hal ini bertujuan agar aparatur desa mampu menetapkan kebijakan dan program yang tepat berdasarkan data yang akurat dan terpercaya.

Aparatur desa juga berperan dalam merencanakan program pengentasan kemiskinan desa yang relevan secara kontekstual dalam kerangka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa

- Hutabarat, W., Syahnur, S., & Dawood, T.C. (2023). How Population, Economic, Inequality and Unemployment Contribute Affect Indonesian's Poverty. *International Journal of Advances in Social Sciences and Humanities*. <https://doi.org/10.56225/ijassh.v2i1.92>
- Ibrahim, H.I., Isa, A., & Shahbudin, A.S. (2016). Organizational Support and Creativity: The Role of Developmental Experiences as a Moderator. *Procedia. Economics and finance*, 35, 509-514. <https://doi.org/10.1016/S2212-5671%2816%2900063-0>
- Idrus, S., & Rosida, L. (2020). Poverty In Indonesia: Critical Review. *American Book Review*, 8, 127-132. <https://doi.org/10.14738/abr.86.8326>
- Imbaruddin, A. (2003). Understanding Institutional Capacity of Local Government Agencies in Indonesia. <https://doi.org/10.25911/5D7A2B08970A2>
- Ishom, M.I., Sucipto, Zulkarnain, Raharjo, K.M., Fatihin, M.K., & Avrilianda, D. (2021). Analysis of Community Empowerment Strategies in the Context of Increasing Vocational Skills in the Community Assistance Program for Village Development Facilitators in Wagir District, Malang Regency.
- jimi, A. (2019). Rancang Bangun Sistem Informasi Desa Berbasis Website (Studi Kasus Desa Netpala). *Jurnal Pendidikan Teknologi Informasi (JUKANTI)*. <https://doi.org/10.37792/jukanti.v2i1.17>
- Joo, B., McLean, G.N., & Yang, B. (2013). Creativity and Human Resource Development. *Human Resource Development Review*, 12, 390 - 421. <https://doi.org/10.1177/1534484313481462>
- Kadir, K., & Amalia, R.R. (2016). Economic growth and poverty reduction: the role of the agricultural sector in rural Indonesia.
- Khavul, S., & Bruton, G.D. (2013). *Harnessing Innovation for Change: Sustainability and Poverty in Developing Countries*. Wiley-Blackwell: *Journal of Management Studies*. <https://doi.org/10.1111/j.1467-6486.2012.01067.x>

Kim, S., & Yoon, G. (2015). An Innovation-Driven Culture in Local Government. *Public Personnel Management*, 44, 147 - 168. <https://doi.org/10.1177/0091026014568896>

Kurniawan, T. (2018). E-Musrenbang As A Means In Increasing Community Participation In Development Planning In Indonesia: Its Challenges And Obstacles. <https://doi.org/10.2991/AAPA-18.2018.2>

Maemunah, S., Pertiwi, W., & Yuliawati, J. (2023). Implementation Of Working Discipline In Improving Employee Performance In The Secretariat Of The DPRD Karawang District. *Edutran Business and Management*. <https://doi.org/10.59805/ebm.v1i1.18>

Maharani, D. (2020). Application of E-Government Manajemen System in Improving Village Capacity Service to The Community to Support Industrial Revolution 4.0. *Journal of Physics: Conference Series*, 1477. <https://doi.org/10.1088/1742-6596/1477/2/202026>

Mangkunegara, A.P. (2002), *Manajemen Sumber Daya Manusia*, PT. Remaja Rosda Karya, Bandung.

Marota, R., & Alipudin, A. (2019). Monitoring System on Village Fund: Synergy Between Communities and Regulators (Case Study on Bogor District Government). *JHSS (Journal of Humanities and Social Studies)*. <https://doi.org/10.33751/JHSS.V3I2.1456>

Maulu, S., Hasimuna, O.J., Mutale, B., Mphande, J., & Siankwilimba, E. (2021). Enhancing the role of rural agricultural extension programs in poverty alleviation: A review. *Cogent Food & Agriculture*, 7. <https://doi.org/10.1080/23311932.2021.1886663>

Mayo, A. 2000, "The Role Of Employee Development In The Growth Of Intellectual Capital. *Personnel Review*, Vol. 29, No. 4, pp.521 – 533

McLean, L. (2005). Organizational Culture's Influence on Creativity and Innovation: A Review of the Literature and Implications for Human Resource Development. *Advances*

- in *Developing Human Resources*, 7, 226 - 246. <https://doi.org/10.1177/1523422305274528>
- Morling, MS dan A Yakhlef (1999), *The Intellectual Capital: Managing by Measure*, New York: City University of New York
- Moussa, M., McMurray, A.J., & Muenjohn, N. (2018). Innovation in public sector organisations. *Cogent Business & Management*, 5. <https://doi.org/10.1080/23311975.2018.1475047>
- Nguyen, H.T., & Hipsher, S.A. (2018). Innovation and Creativity Used by Private Sector Firms in a Resources-Constrained Environment. <https://doi.org/10.4018/978-1-5225-3117-3.CH010>
- Nirmaya, G.C. (2019). Perencanaan Program Pelatihan Masyarakat dalam Mendukung Agenda Prioritas Pembangunan Desa. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*. <https://doi.org/10.21776/UB.JIAP.2019.005.01.4>
- Nurcholis, C., Sakti, S.W., & Rachman, A.S. (2019). Village Administration in Indonesia: A Socio-Political Corporation Formed by State. *Open Journal of Political Science*. <https://doi.org/10.4236/ojps.2019.92021>
- Pansera, M., & Martinez, F. (2017). Innovation for development and poverty reduction: an integrative literature review. *Journal of Management Development*, 36, 2-13. <https://doi.org/10.1108/JMD-02-2015-0013>
- Pathak, R.D. (2008). Grass-root creativity, innovation, entrepreneurialism and poverty reduction. *International Journal of Entrepreneurship and Innovation Management*, 8, 87-98. <https://doi.org/10.1504/IJEIM.2008.018617>
- Pahrudin, Hm. (2020). The policy of improving village apparatus' capacity to increasing community welfare in Merangin Regency, Jambi Province. *MIMBAR : Jurnal Sosial dan Pembangunan*. <https://doi.org/10.29313/mimbar.v36i2.5895>
- Prisanda, E., & Febrina, R. (2021). Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi Berbasis Aplikasi SISPEDAL Dalam Rangka Mewujudkan Good Village Governance. <https://doi.org/10.29313/mimbar.v36i2.5895>

org/10.36636/JOGIV.V3I2.723

- Putra, F. (2022). Village Development Initiative as an Alternative Strategy of Rural Poverty Reduction: An Evaluation of Village Fund Program in Indonesia. *International Journal of Social Science and Human Research*. <https://doi.org/10.47191/ijsshr%2Fv5-i4-35>
- Purwono, R., Wardana, W.W., Haryanto, T., & Mubin, M.K. (2021). Poverty dynamics in Indonesia: empirical evidence from three main approaches. *World Development Perspectives*, 23, 100346. <https://doi.org/10.1016/J.WDP.2021.100346>
- Raharjo, T., Ubed, R.S., Yudanto, A.A., & Yuliati, R. (2021). Innovations of Village Asset Management: A Case of The Best Indonesian Village. *Planning Malaysia*. <https://doi.org/10.21837/pm.v19i17.1021>
- Rodiyah, R. (2018). Reformation of the Administration of Village Government in Indonesia Based on Law Number 6 of 2014 on Villages (Comparing Normative and Empirical Facts on Villagers Participation). <https://doi.org/10.2991/icils-18.2018.50>
- Roffe, I. (1999). Innovation and Creativity in Organisations: A Review of the Implications of Training and Development. *Journal of European Industrial Training*, 23, 224-241. <https://doi.org/10.1108/03090599910272103>
- Sahriyal, S., Erny, E., & Neswita, N. (2022). Pelatihan Penggunaan Internet Bagi Pegawai Kantor dan Perangkat Desa Rantau Mapesai. *Jurnal Pengabdian Masyarakat (abdira)*. <https://doi.org/10.31004/abdira.v2i3.184>
- Said, M., & Cahyasari, E. (2020). Village Innovation Based on Community. <https://doi.org/10.2991/aebmr.k.201116.035>
- Seroka, J. (1989). Public Administration and Planning in Rural Areas. *Journal of Planning Literature*, 4, 430 - 444. <https://doi.org/10.1177/088541228900400405>
- Serrat, O. (2009). Harnessing Creativity and Innovation in the Workplace. https://doi.org/10.1007/978-981-10-0983-9_102

Shpykuliak, O., & Sakovska, O. (2020). AGRICULTURAL COOPERATION AS AN INNOVATION FOR RURAL DEVELOPMENT. *Baltic Journal of Economic Studies*. <https://doi.org/10.30525/2256-0742%2F2020-6-3-183-189>

Sigit, T.A., & Kosasih, A. (2020). Pengaruh Dana Desa terhadap Kemiskinan: Studi Tingkat Kabupaten/Kota di Indonesia. <https://doi.org/10.33105/itrev.v5i2.170>

Simamora. (1999), *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Penerbit STIE YKPN, Jakarta cetakan kedua Edisi KE-2.

Stewart. (1998). *Empowering People*. Jakarta : Penerbit Kanisius

Sugiartana, I.W. (2021). Village Development with Creativity Based on Local Wisdom in Bali. *International Journal of Multidisciplinary Research and Analysis*. <https://doi.org/10.47191/IJMRA%2FV4-I7-09>

Suryadarma, D., Sumarto, S., & Suryahadi, A. (2006). Economic growth and poverty reduction in Indonesia: the effects of location and sectoral components of growth.

Suryani, A. (2022). The accountability of village funds and to improve the effectiveness of village programs. *Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah*. <https://doi.org/10.22437/ppd.v10i2.15630>

Suswanto, B., Windiasih, R., Sulaiman, A.I., & Weningsih, S. (2019). Peran Pendamping Desa Dalam Model Pemberdayaan Masyarakat Berkelanjutan. <https://doi.org/10.20884/JUSS.V2I2.1528>

Sutiyo, & Maharjan, K.L. (2011). Rural Poverty Alleviation in Indonesia : Programs and the Implementation Gap. <https://doi.org/10.15027/32448>

Sutiyo, & Maharjanj, K.L. (2013). Capacity of Rural Institutions in Implementing Decentralized Development in Indonesia : Case of Three Villages in Purbalingga District, Central Java Province (Communities and Livelihood Strategies in Developing Countries). https://doi.org/10.1007/978-4-431-54774-7_10

- Tarlani, & Sirajuddin, T.H. (2020). Rural development strategies in Indonesia: Managing villages to achieve sustainable development. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 447. <https://doi.org/10.1088/1755-1315%2F447%2F1%2F012066>
- Tomashuk, I. (2017). Problems and Prospects of Management of Rural Development. *Baltic Journal of Economic Studies*, 3, 214-220. <https://doi.org/10.30525/2256-0742%2F2017-3-5-214-220>
- Torre, A., & Wallet, F. (2013). Innovation and governance of rural territories. https://doi.org/10.3920/978-90-8686-768-4_8
- Triatmanto, B., Respati, H., & Rachyuningsih, E. (2014). Accelerating The Achievement Of Participatory Rural Appraisal Based Mdgs Through Empowerment Of Human Resources. *IOSR Journal of Business and Management*, 16, 38-44. <https://doi.org/10.9790/487X-161153844>
- West, M.A., & Farr, J.L. (1992). Innovation and creativity at work::Psychological and organizational strategies. *Administrative Science Quarterly*, 37, 679. <https://doi.org/10.2307/2393481>
- Wicaksana, F.G., Trihatmoko, R.A., Suhardjanto, D., & Murtini, H. (2019). The Regulation on Village Governance in Indonesia: Efficient Contracting in Agency Theory. *Journal of Public Administration and Governance*. <https://doi.org/10.5296/JPAG.V9I2.14812>
- Yuesti, A., & Castro Menes, C. (2022). Role of Organizational Culture and Performance of Bumdesa in Improving the Rural Economy. *SOCA: Jurnal Sosial, Ekonomi Pertanian*. <https://doi.org/10.24843/soca.2022.v16.i02.p04>
- Yunus, M., & Sani, K.R. (2017). The Capacity Building of Local Government in Sanjai village, Sinjai Regency. <https://doi.org/10.29313/mimbar.v33i2.2190>
- Yuan, D., Yau, Y., & Bao, H. (2019). Institutional Innovation for Urban Village Renewal in Mainland China. *Practice, Progress, and Proficiency in Sustainability*. <https://doi.org/10.4018/978-1->

5225-7158-2.CH004

Zhou, M., Bonenberg, W., Wei, X., & Qi, L. (2022). Enhancing Rural Sustainable Development and Rural Innovation through Adaptive Design Strategies. *Human Factors in Architecture, Sustainable Urban Planning and Infrastructure*. <https://doi.org/10.54941/ahfe1002344>

DILINDUNGI UU NO. 28 TAHUN 2014
DILARANG DIGANDAKAN DAN DISEBARLUASKAN

DILINDUNGI UU NO. 28 TAHUN 2014
DILARANG DIGANDAKAN DAN DISEBARLUASKAN

BAB 11
DIGITALISASI UMKM
SEBAGAI UPAYA
PENANGGULANGAN
KEMISKINAN
DI KABUPATEN
BANYUMAS

Ranjani, Alizar Isna

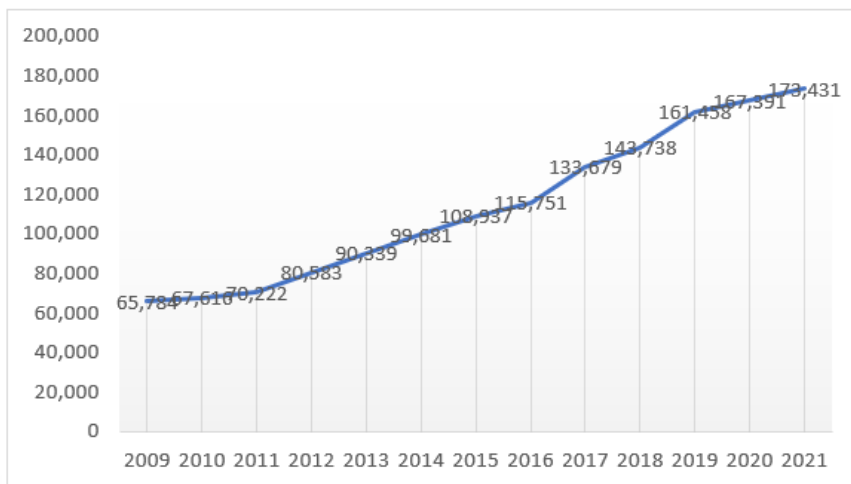
A. Pendahuluan

Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) menjadi salah satu alternatif yang dipilih pemerintah untuk mengurangi pengangguran, mengentaskan kemiskinan dan pemerataan pendapatan (Andiny dan Nurjannah, 2018). Sehubungan dengan peran strategis UMKM dan keterbatasan kemampuan UMKM untuk berkembang, pemerintah menginisiasi upaya pengembangan usaha kecil sebagai salah satu strategi dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Permasalahan yang dihadapi sekaligus yang menjadi kelemahan bagi UMKM adalah kurangnya akses informasi, khususnya informasi pasar (Ishak, 2005).

Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah pengguna aktif internet yang cukup tinggi yaitu sekitar 151 juta dengan tingkat penetrasi sebesar 54% yang sebenarnya jauh lebih tinggi dibandingkan tingkat global (Suliswanto & Rofik, 2019). Keterbukaan internet membuka peluang lebih besar bagi para wirausaha, salah satunya bagi UMKM. Dengan didorongnya akses internet yang terbuka, UMKM mempunyai peluang untuk tumbuh lebih cepat dan mempermudah proses perluasan pasar (Manyika & Roxburgh, 2019). Lebih lanjut, keberadaan internet dapat menekan biaya promosi (Suliswanto & Rofik, 2019).

Berbagai peluang yang ditawarkan internet sebagai sarana pengembangan bisnis UMKM belum sepenuhnya dimanfaatkan oleh para pelaku UMKM di Indonesia. Hal ini sesuai dengan data yang disampaikan Kementerian Koperasi dan UMKM, bahwa baru 8 persen atau baru 3,79 juta dari total 59,2 juta UMKM di Indonesia yang sudah memaksimalkan fungsi internet untuk memajukan usahanya, baik dari sisi penjualan maupun pemasaran (Ayuwuragil, 2017).

Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang selalu mengalami peningkatan jumlah UMKM setiap tahunnya. Sebagai bukti peningkatan jumlah UMKM dapat dilihat pada gambar 2 berikut yang merupakan grafik peningkatan jumlah UMKM di Jawa Tengah dari tahun 2009 hingga tahun 2021:

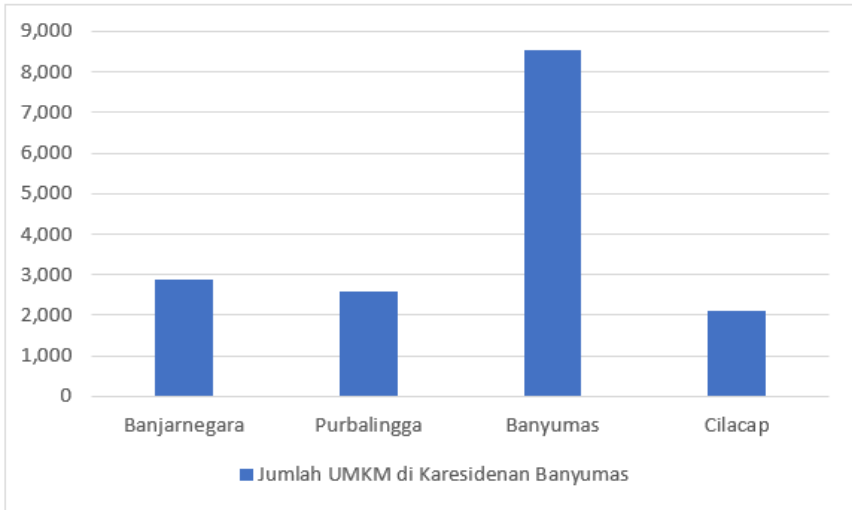


Gambar 1. Jumlah UMKM di Jawa Tengah pada tahun 2009 hingga 2021

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Jawa Tengah, 2022.

Berdasarkan informasi pada Gambar 1 di atas diketahui bahwa Provinsi Jawa Tengah mengalami peningkatan jumlah UMKM setiap tahunnya dari tahun 2009 hingga tahun 2021, yang semula hanya 65.878 UMKM yang dimiliki Provinsi Jawa Tengah, pada tahun 2021 meningkat drastis menjadi 173.431 UMKM. . Data ini menjadi menarik setelah kita kaitkan dengan masuknya virus COVID-19 pada tahun 2019, bahwa pandemi COVID-19 tidak mengakibatkan berkurang atau berkurangnya jumlah UMKM di Jawa Tengah, melainkan terus meningkat.

Kabupaten Banyumas merupakan salah satu kabupaten di Jawa Tengah yang mengandalkan UMKM sebagai penunjang perekonomian. Kabupaten Banyumas merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang memiliki jumlah UMKM terbanyak jika dibandingkan dengan kabupaten lain di sekitarnya. Berikut data jumlah UMKM di Karesidenan Banyumas tahun 2022:



Gambar 2. Jumlah UMKM di Karesidenan Banyumas
 Sumber: Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Provinsi Jawa Tengah, 2022.

Data gambar 2 di atas menunjukkan bahwa jika dibandingkan dengan 3 (tiga) kabupaten yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Banyumas (Banjarnegara, Purbalingga, dan Cilacap), Kabupaten Banyumas menduduki peringkat pertama dengan jumlah UMKM terbanyak yaitu 8.543 UMKM.

Banyaknya UMKM yang dimiliki Kabupaten Banyumas menggerakkan Pemerintah Kabupaten Banyumas melalui Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Dinnakerkop UKM) untuk menerapkan digitalisasi UMKM melalui “Glasirosi” atau Digitalisasi, Kolaborasi dan Integrasi yang dimaksudkan sebagai sarana promosi bagi UMKM. di Kabupaten Banyumas (Darmawan, 2022).

Pandemi COVID-19 memberikan dampak langsung terhadap sektor perekonomian Kabupaten Banyumas dengan mengakibatkan terjadinya PHK terhadap 1.222 pekerja dari 54 instansi di Kabupaten Banyumas (Antara, 2020). Berbagai dampak yang timbul akibat pandemic Covid-19 menimbulkan masalah-masalah baru berkaitan dengan perekonomian Masyarakat hingga bertambahnya jumlah keluarga miskin. Sehingga dalam penelitian ini akan dianalisis

secara lebih lanjut permasalahan yang berkaitan dengan digitalisasi UMKM sebagai upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Banyumas. Penelitian mengenai digitalisasi telah banyak dilakukan oleh peneliti terdahulu, namun penelitian mengenai digitalisasi UMKM di Kabupaten Banyumas masih sangat jarang dilakukan sehingga penelitian ini penting untuk dilakukan, mengingat pentingnya peran UMKM dalam menunjang perekonomian masyarakat, khususnya dalam menanggulangi masalah kemiskinan di Kabupaten Banyumas.

B. Metode

Penelitian ini menganalisis dan mendeskripsikan permasalahan mengenai Digitalisasi UMKM sebagai upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Banyumas. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif yang terutama dilakukan melalui pertanyaan terbuka, berbagai data berupa teks dan gambar melalui pendekatan emerging (Creswell, 2014). Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan melalui metode wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. Sebagai alat pemilihan informan, peneliti menggunakan teknik purposive sampling. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan model analisis interaktif dari Miles et.al (2014) yaitu melalui proses pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data dan verifikasi data serta penarikan kesimpulan.

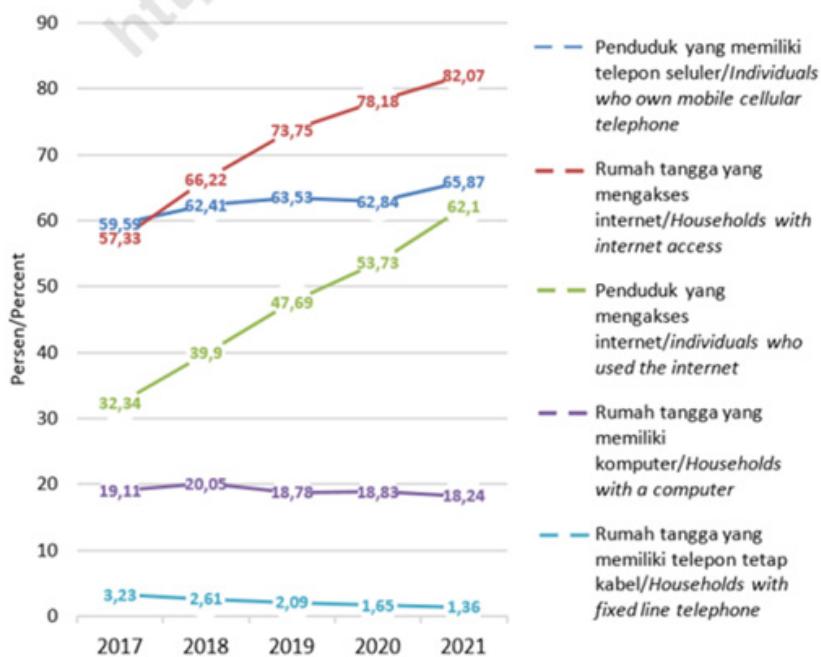
C. Hasil dan Pembahasan

Era globalisasi telah mengubah hampir seluruh tatanan industri guna beradaptasi dan memenuhi tuntutan yang semakin meningkat (Andulkar et al. 2018). Hal ini memerlukan penyesuaian rantai produksi secara efisien dan fleksibel, sehingga hanya akan menghasilkan produk yang sengaja dirancang dalam jumlah terbatas sesuai permintaan (Müller et al. 2017) namun dengan kapasitas dan biaya produksi massal (Bogner et al. .2016). Dalam mengatasi perubahan tersebut, digitalisasi diyakini sebagai teknologi yang

paling penting (Zhou 2013).

Digitalisasi secara total mengubah karakter dan sifat model kewirausahaan menjadi lebih berbasis pada perkembangan digital (Nambisan, 2017). Digitalisasi berfokus pada proses perubahan organisasi melalui adopsi teknologi digital (Sebastian et al. 2017; Vial 2019), yang mengubah organisasi menjadi artefak, infrastruktur, dan platform digital (Briel et al. 2018; Giones & Brem 2017; Nambisan 2017; Nambisan et al. 2019; Yi et al. 2019), serta mekanisme bisnis dan manajemen digital (Srinivasan dan Venkatraman 2018). Teknologi digital merupakan kombinasi teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi dalam sistem komputer (Sturgeon, 2019), dapat diprogram, dapat dialamatkan, logis, dapat dilacak, disosialisasikan, dikomunikasikan dan mudah diingat (Yoo, 2010). Oleh karena itu, transformasi digital atau digitalisasi dapat membantu suatu perusahaan untuk memperoleh dan mempertahankan daya saing dan keunggulannya melalui berbagai upaya untuk meningkatkan fleksibilitas dan ketahanan organisasinya (Briel et al. 2018) serta dengan melakukan perbaikan pada kapabilitas dinamisnya (Sambamurthy et al. al.2003; vial 2019).

Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah pengguna internet aktif yang tinggi. Selama lima tahun terakhir, pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di Indonesia menunjukkan perkembangan yang sangat signifikan dan peningkatan jumlah penggunaannya. Perkembangannya terlihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 3. Tren Indikator TIK di Indonesia, 2017 – 2021.

Sumber: BPS, 2022.

Berdasarkan gambar di atas, diketahui bahwa indikator perkembangan teknologi informasi dan komunikasi paling pesat terjadi pada penggunaan internet rumah tangga dengan angka sebesar 82,07 persen pada tahun 2021. Kemudian, pertumbuhan penggunaan internet pada rumah tangga diikuti oleh pertumbuhan penggunaan internet pada penduduk yang memiliki telepon seluler. pada tahun 2017-2021 yang mencapai 65,87 persen. Sedangkan kepemilikan komputer rumah tangga pada tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 18,24 persen. Jumlah penduduk yang menggunakan internet mengalami peningkatan selama periode 2017-2021, hal ini ditunjukkan dengan peningkatan persentase penduduk yang mengakses internet pada tahun 2017 sekitar 32,34 persen menjadi 62,10 persen pada tahun 2021. Di sisi lain, kepemilikan telepon tetap kabel di rumah tangga mengalami penurunan. dari tahun ke tahun, pada tahun 2018 persentase rumah tangga yang memiliki/menguasai telepon rumah berkisar 2,61

Indonesia). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Darmawan, Lilik. (2022). Pemkab Banyumas Luncurkan Gilasirosi untuk Promosi Produk UMKM. <https://mediaindonesia.com/nusantara/492999/pemkab-banyumas-luncurkan-gilasirosi-untuk-promosi-produk-umkm>. Diakses pada 10 Oktober 2022.

Effendi, H.E. 2019. 7000 UMKM di Banyumas Masih Bertahan. Diakses pada 15 Oktober 2020, Suwiknyo, E. 2020. DAMPAK COVID-19: Ribuan

Giones, F., & Brem, A. (2017). Digital technology entrepreneurship: A definition and research agenda. *Technology Innovation Management Review*, 7(5), 44–51.

Ishak, E. (2005). Peranan Informasi Bagi Kemajuan UKM. Yogyakarta: Kedaulatan Rakyat.

Manyika, J., & Roxburgh, C. (2011). The great transformer: The impact of the Internet on economic growth and prosperity. McKinsey Global Institute, 1–10. Retrieved from http://www.iei.liu.se/facksprak/engelska/civilingenjorsutbildning/then18/kursmaterialarkiv/lesson-twelve/1.333650/The_great_transformer_Impact_of_Internet_on_economic_growth.pdf.

Marques, Maria; Agostinho, Carlos; Zacharewicz, Gregory et al. (2017): Decentralized decision support for intelligent manufacturing in Industry 4.0. In: *Journal of Ambient Intelligence and Smart Environments*, vol. 9, no. 3, pp. 299–313.

Müller, Egon; Hopf, Hendrik. (2017): Competence Center for the Digital Transformation in Small and Medium-Sized Enterprises. In: *Procedia Manufacturing*, vol. 11, pp. 1495–1500.

Nambisan, S. (2017). Digital entrepreneurship: Toward a digital technology perspective of entrepreneurship. *Entrepreneurship Theory and Practice*, 41(6), 1029–1055.

Nambisan, S., Wright, M., & Feldman, M. (2019). The digital transformation of innovation and entrepreneurship: Progress, challenges and key themes. *Research Policy*, 48(8), 1–9.

- O'Regan, N., Ghobadian, A., & Gallear, D. (2006). In search of the drivers of high growth in manufacturing SMEs. *Technovation*, 26(1), 30–41.
- Oppong, M., Owiredu, A., Churchill, R.Q., 2014. Micro and small scale enterprises development in Ghana. *Eur. J. Account. Audit. Finance Res.* 2 (6), 84–97.
- Sambamurthy, V., Bharadwaj, A., & Grover, V. (2003). Shaping agility through digital options: Reconceptualizing the role of information technology in contemporary firms. *MIS Quarterly*, 27(2), 237–263.
- Sebastian, I., Ross, J., Beath, C., Mocker, M., Moloney, K., & Fonstad, N. (2017). How big old companies navigate digital transformation. *MIS Quarterly*, 16(3), 197–213.
- Sturgeon, T. J. (2019). Upgrading strategies for the digital economy. *Global Strategy Journal*, 11(7), 1–24.
- Suliswanto, Muhammad Sri Wahyudi dan Rofik, Mochamad. (2019). Digitalization of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) In East Java Indonesia. *Muhammadiyah International Journal of Economics and Business*, Vol. 1, No. 2.
- Vial, G. (2019). Understanding digital transformation: A review and a research agenda. *The Journal of Strategic Information Systems*, 28(2), 118–144.
- Vieru, Dragos; Bourdeau, Simon; Bernier, Amelie et al. (2015): Digital Competence. A Multi-dimensional Conceptualization and a Typology in an SME Context. In: 48th Hawaii International Conference on System Sciences (HICSS), pp. 4681–4690, IEEE, Piscataway, NJ.
- Yi, J., He, J., & Yang, L. (2019). Platform heterogeneity, platform governance and complementors' product performance: An empirical study of the mobile application industry. *Frontiers of Business Research in China*, 13(1), 1–20.
- Yoo, Y. (2010). Computing in everyday life: A call for research on experiential computing. *MIS Quarterly*, 34(2), 213–231.

Zhou, Ji (2013): Digitalization and intelligentization of manufacturing industry. In: *Advances in Manufacturing*, vol. 1, no. 1, pp. 1–7.

DILINDUNGI UU NO. 28 TAHUN 2014
DILARANG DIGANDAKAN DAN DISEBARLUASKAN

BAB 12
PUBLIC-PRIVATE
PARTNERSHIP
DALAM MENANGANI
KEMISKINAN DAN
STUNTING DI
PERDESAAN

*Slamet Rosyadi, Muhammad Yamin, Agus Ganjar Runtiko,
Denok Kurniasih, Zaula Rizky Atika, Shadu Satwika Wijaya*

A. Pendahuluan

Meskipun pembangunan ekonomi Indonesia terus membaik, permasalahan kemiskinan dan stunting masih belum terselesaikan (Papilaya, 2020). Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), pada September 2022, jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 26,16 juta orang, atau mencakup sekitar 9,54% dari total penduduk (Goma, Sandy & Zakaria, 2021). Angka kemiskinan mengalami peningkatan dibandingkan September 2021 sebesar 10,14%. Demikian pula dengan stunting, yang mengacu pada gangguan pertumbuhan dan perkembangan pada anak kecil akibat kekurangan gizi kronis, yang mengikuti pola yang sama (Kustanto, 2021). Berdasarkan temuan Riskesdas 2019, prevalensi stunting di Indonesia sebesar 27,7%. Menurut data yang ada, lebih dari seperempat populasi balita di Indonesia mengalami kondisi stunting (Rusliani, Hidayani & Sulistyoningsih, 2022). Angka-angka yang disajikan sangat memprihatinkan dan menunjukkan bahwa permasalahan gizi buruk di Indonesia masih sangat kritis (Doni dkk, 2020).

Upaya penurunan angka kemiskinan dan stunting telah dilakukan pemerintah melalui berbagai program seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS), bantuan pangan nontunai, dan intervensi gizi spesifik lainnya (Nulhaqim dkk, 2019). Namun, karena akar penyebab kemiskinan dan stunting bersifat multidimensi, maka diperlukan pendekatan kolaboratif dari berbagai pemangku kepentingan. Masyarakat semakin menuntut program pengentasan kemiskinan dan stunting yang tepat sasaran, terukur dampaknya, dan mampu memberikan hasil nyata dalam waktu singkat (Yuda, 2023).

Sejumlah penelitian sebelumnya telah melakukan evaluasi terhadap efektivitas berbagai program yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dan stunting di Indonesia. Penelitian yang dilakukan Suleman & Resnawaty (2020) mengungkapkan bahwa program seperti PKH dan bantuan pangan nontunai terbukti cukup efektif dalam mengurangi kemiskinan dan kesenjangan.

Namun, penelitian lain yang dilakukan oleh Qodrina & Sinuraya (2021) menyimpulkan bahwa stunting disebabkan oleh faktor multidimensi, sehingga menunjukkan bahwa intervensi tunggal seperti suplementasi nutrisi tidak cukup efektif. Diperlukan kolaborasi yang lebih solid antara sektor-sektor dan para pemangku kepentingan. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Fan, Zhang & Zhang (2000) di Tiongkok menunjukkan bahwa keterlibatan sektor swasta dalam program pengentasan kemiskinan memiliki dampak yang signifikan terhadap peningkatan produktivitas dan pendapatan kelompok miskin pedesaan. Hal ini semakin memperkuat pentingnya menjalin kemitraan antara pemerintah dan swasta (public-private) dalam upaya mengatasi permasalahan sosial di Indonesia, termasuk kemiskinan dan stunting.

Tujuan dari studi ini adalah untuk menganalisis model kemitraan pemerintah-swasta atau Public-Private Partnership (PPP) dalam program pengentasan kemiskinan dan stunting di Indonesia. Studi ini secara khusus akan mengkaji tantangan, peluang, dan strategi optimalisasi Public-Private Partnership (PPP) guna meningkatkan efektivitas intervensi kemiskinan dan stunting di Indonesia. Artikel ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi kebijakan konkrit bagi pemerintah dan dunia usaha untuk bersinergi dalam mengatasi permasalahan sosial yang terus menghambat pembangunan inklusif dan berkelanjutan di Indonesia.

Dengan menerapkan skema Public-Private Partnership (PPP), diharapkan bahwa upaya untuk mengurangi kemiskinan dan stunting di Indonesia dapat mencapai hasil yang lebih optimal dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sektor swasta mempunyai potensi untuk memberikan kontribusi yang signifikan dalam hal sumber daya, keahlian, teknologi, dan modal. Sementara pemerintah terus berperan dalam memastikan program-program yang tepat sasaran dan berkelanjutan. Dengan menggabungkan keunggulan komparatif yang dimiliki oleh masing-masing pihak, diperkirakan bahwa pencapaian target penurunan kemiskinan dan stunting dapat dilakukan dengan lebih efisien daripada hanya mengandalkan program sektor publik atau swasta secara terpisah. Argumen ini diperkuat oleh bukti empiris mengenai keberhasilan model PPP dalam upaya mengurangi tingkat kemiskinan di beberapa

negara. Oleh karena itu, makalah ini bertujuan untuk merumuskan model kolaborasi yang ideal antara pemerintah Indonesia dan sektor swasta dalam mengatasi masalah sosial kemiskinan dan stunting.

B. Tinjauan Pustaka

Public-Private Partnership (PPP)

Public-Private Partnership (PPP) telah muncul sebagai model kolaboratif yang populer dalam memberikan layanan publik di berbagai negara (Dzaky, 2021). PPP melibatkan kolaborasi antara entitas pemerintah dan sektor swasta dalam rangka membangun, membangun, dan mengoperasikan proyek atau layanan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara umum (Alfen et.al, 2009; Mudiparwanto & Gunawan, 2022). Dalam konteks program pengurangan kemiskinan, pendekatan Public-Private Partnership (PPP) diimplementasikan melalui berbagai skema yang meliputi program pemberdayaan ekonomi, peningkatan keterampilan, aksesibilitas kesehatan dan pendidikan, serta pembangunan infrastruktur di wilayah yang tergolong daerah miskin (Aziz, 2007).

Di India, kemitraan antara pemerintah dan perusahaan telekomunikasi telah menghasilkan pengembangan model desa digital yang bertujuan untuk meningkatkan akses internet dan keterampilan digital di kalangan penduduk pedesaan yang miskin (James, 2002; Pawar, 2021). Penelitian ini mengungkapkan bahwa model yang diimplementasikan berhasil meningkatkan tingkat literasi dan inklusi digital, yang pada gilirannya membuka peluang ekonomi dan pendidikan bagi warga yang berada dalam kondisi ekonomi yang kurang baik (Chowdary, 2002). Di Afrika Selatan, kemitraan publik-swasta antara pemerintah dan perusahaan konstruksi telah berhasil dalam upaya membangun perumahan yang terjangkau bagi masyarakat dengan pendapatan rendah di daerah perkotaan yang kurang berkembang (Sanni & Hashim, 2014). Hal ini secara signifikan meningkatkan kualitas perumahan dan kesejahteraan penduduk perkotaan yang kurang mampu (Goebel, 2007).

Dalam konteks stunting, Pendekatan Public-Private Partnership (PPP) juga diimplementasikan dalam berbagai program gizi dan kesehatan masyarakat (Zachwieja et.al, 2013). Beberapa bentuk implementasinya antara lain pembangunan posyandu oleh perusahaan, pemberian suplemen gizi oleh lembaga swadaya masyarakat dan dunia usaha, serta upaya kolaborasi dengan media untuk memberikan edukasi gizi seimbang (Atmojo et.al, 2020; Ahmed, 2017). Di Kenya, Unilever berkolaborasi dengan pemerintah untuk terlibat dalam inisiatif pendidikan dan kampanye nutrisi, sehingga berkontribusi terhadap penurunan prevalensi stunting (Matu & Shekar, 2016). Di India, organisasi non-pemerintah (LSM) berkolaborasi dengan pemerintah untuk melaksanakan intervensi gizi di tingkat desa, yang telah terbukti secara signifikan mengurangi kejadian stunting (Avula et.al, 2022).

Di Indonesia, konsep Public-Private Partnership (PPP) diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur (Wardhani, 2023). Salah satu bentuk implementasinya adalah Public-Private Partnership (PPP) atau Kerjasama Pemerintah-Bisnis untuk pembangunan infrastruktur seperti jalan tol, jalur kereta api, penyediaan air bersih, dan lain-lain. Namun, implementasi Public-Private Partnership (PPP) untuk pengentasan kemiskinan dan stunting di Indonesia dinilai masih terbatas (Abdullah, 2020). Sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan perusahaan multinasional saat ini melaksanakan program Corporate Social Responsibility (CSR) yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat dan peningkatan gizi. Potensi Public-Private Partnership (PPP) untuk permasalahan sosial ini belum sepenuhnya optimal (Mariane, 2019).

Berdasarkan pengalaman implementasi di berbagai negara, Public-Private Partnership (PPP) dinilai memiliki beberapa keunggulan dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi program pengentasan kemiskinan dan penurunan stunting (Yurdakul & Kamaşak, 2021). Public-Private Partnership (PPP) mempunyai kapasitas untuk mengintegrasikan keahlian teknis, sumber daya keuangan, dan jaringan operasional dari sektor swasta dengan pengetahuan lokal dan legitimasi pemerintah (Widdus,

2005). Namun, KPS juga tidak luput dari sejumlah tantangan yang perlu diantisipasi, seperti misalignment tujuan, komitmen jangka panjang, dan transparansi (Pessoa, 2006). Oleh karena itu, pembentukan desain kelembagaan dan mekanisme tata kelola yang tepat diperlukan untuk memastikan berfungsinya Public-Private Partnership (PPP) secara optimal dan berkelanjutan.

Berdasarkan uraian studi kasus dan konseptualisasi Public-Private Partnership (PPP) di atas, dapat disimpulkan bahwa PPP berpotensi menjadi salah satu solusi inovatif dalam percepatan pengentasan kemiskinan dan penurunan stunting. Namun demikian, untuk mencapai keberhasilan dan keberlanjutan, model PPP perlu disesuaikan dengan konteks lokal dan didukung oleh komitmen yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan yang terlibat. Studi ini bertujuan untuk merumuskan model Public-Private Partnership (PPP) yang ideal untuk meningkatkan efektivitas upaya pengentasan kemiskinan dan pengurangan stunting di Indonesia, dengan mempertimbangkan peluang dan tantangan yang ada.

Collaborative Governance

Collaborative Governance menghadirkan perspektif baru dalam memahami interaksi antar pemangku kepentingan dari berbagai sektor dalam skema kemitraan seperti Public-Private Partnership (PPP). Menurut Ansell dan Gash (2018), Collaborative Governance Merujuk pada suatu bentuk pengaturan pengambilan keputusan yang melibatkan partisipasi kolektif dari para pemangku kepentingan yang berasal dari sektor publik, swasta, dan masyarakat sipil. Tujuan dari kolaborasi ini adalah untuk mencapai kesepakatan dalam membuat keputusan atau menyelesaikan masalah yang bersifat publik.

Ada beberapa karakteristik utama dalam Collaborative Governance (Ansell & Gash, 2008), yaitu:

1. Adanya forum kelembagaan yang melibatkan pemangku kepentingan non-pemerintah dalam proses pengambilan keputusan kolektif.

2. Forum kelembagaan bercirikan pendekatan yang berorientasi pada konsensus dan bukan pendekatan mayoritas. Keputusan diusahakan untuk mempertimbangkan kepentingan semua pihak yang terlibat, bukan hanya ditentukan oleh mayoritas suara.
3. Forum kelembagaan memiliki sifat deliberatif, yang berarti proses pengambilan keputusan didasarkan pada diskusi terbuka dan pertukaran argumen yang rasional.
4. Forum kelembagaan bertujuan untuk memfasilitasi pengambilan keputusan kolektif yang mengikat seluruh anggota, dan tidak hanya didorong oleh satu aktor saja.

Dalam konteks penerapan skema PPP, prinsip-prinsip Collaborative Governance dapat berperan dalam mengatasi kecenderungan ego-sektoral dan memfasilitasi keselarasan kepentingan antara berbagai pemangku kepentingan yang terlibat. Dengan adanya forum kolaboratif lintas sektor yang inklusif, deliberatif, dan berorientasi pada konteks, diharapkan program Public-Private Partnership (PPP) dapat dirancang dan diimplementasikan dengan lebih efektif dan akuntabel dalam upaya pengurangan pengurangan kemiskinan dan stunting.

Selain prinsip-prinsip umum yang telah disebutkan di atas, Emerson et.al (2012) mengidentifikasi lima elemen utama yang mempengaruhi keberhasilan Collaborative Governance, yaitu:

1. Inklusivitas pemangku kepentingan.

Public-Private Partnership (PPP) mensyaratkan keikutsertaan seluruh pemangku kepentingan terkait, termasuk pemerintah daerah, kementerian/lembaga, korporasi, LSM, akademisi, media, dan kelompok masyarakat, dalam keterwakilannya. Semua suara yang ada haruslah diindera dan diakomodasi.

2. Motivasi kolektif

Pentingnya membangun pemahaman kolektif mengenai tujuan, manfaat, dan urgensi Public-Private Partnership (PPP) dalam mengatasi kemiskinan dan stunting. Hal ini mendorong komitmen dari semua pihak yang terlibat.

3. Konsep saling ketergantungan

Mengacu pada saling ketergantungan dan keterhubungan antara entitas atau sistem yang berbeda. Ini menyoroti gagasan bahwa entitas-entitas ini. Para pemangku kepentingan mengakui saling ketergantungan dan perlunya Public-Private Partnership (PPP) untuk mencapai tujuan bersama. Tidak ada aktor yang mampu menyelesaikan permasalahan secara individu.

4. Komitmen terhadap Proses Kolaborasi

Semua entitas yang terlibat memiliki tekad yang kuat untuk terlibat secara menyeluruh dalam proses komunikasi, negosiasi, dan kolaborasi dalam kemitraan publik-swasta. Tidak ada individu yang terlibat dalam perilaku "free rider".

5. Fasilitasi kepemimpinan kolektif

Dalam konteks ini, diperlukan seorang fasilitator netral yang bertugas untuk mengoordinasikan proses komunikasi dan pengambilan keputusan secara kolaboratif di antara para pemangku kepentingan dalam Public-Private Partnership (PPP).

Dengan mempertimbangkan kelima elemen yang telah disebutkan, diharapkan bahwa interaksi antara pemangku kepentingan dalam kemitraan publik dan swasta dapat berlangsung dengan lebih konstruktif. Keputusan yang dihasilkan juga akan memiliki legitimasi yang lebih tinggi dan mendapatkan dukungan secara kolektif. Namun perlu diperhatikan bahwa pembentukan Collaborative Governance memerlukan waktu dan melalui beberapa tahapan: pra-negosiasi, penetapan masalah, penetapan arah, penataan, dan hasil.

Dalam hal manfaatnya, penelitian telah mengindikasikan bahwa penerapan prinsip-prinsip Collaborative Governance dapat menghasilkan peningkatan dalam kualitas keputusan publik (Ansell & Gash, 2018). Hal ini dapat dicapai melalui:

1. Peningkatan legitimasi melalui keterlibatan pemangku kepentingan.

2. Peningkatan kualitas informasi melalui pertukaran informasi lintas batas organisasi.
3. Salah satu cara untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan adalah melalui koordinasi antarlembaga.
4. Terbentuknya kepercayaan antar pemangku kepentingan sebagai bentuk modal sosial.
5. Pengurangan potensi konflik dilakukan melalui konsensus dan komunikasi terbuka.

Oleh karena itu, dalam konteks Public-Private Partnership (PPP) untuk pengentasan kemiskinan dan penurunan stunting, penerapan Collaborative Governance dinilai sangat penting. Dengan mengadopsi pola hubungan yang lebih kolaboratif dan menghindari sikap ego-sektoral, program Public-Private Partnership (PPP) dapat direncanakan dan dilaksanakan dengan lebih efektif dan akuntabel dalam rangka mempercepat pencapaian target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) di Indonesia. Kemitraan yang berlandaskan prinsip Collaborative Governance ini juga akan lebih berkelanjutan karena adanya motivasi bersama, komitmen kolektif, dan rasa saling percaya antar pemangku kepentingan.

Namun penerapan Tata Kelola Kolaboratif dalam Kemitraan Pemerintah-Swasta bukannya tanpa tantangan. Beberapa tantangan yang mungkin muncul antara lain kurangnya kemauan politik, rendahnya kapasitas kelembagaan, kuatnya ego sektoral, ketidakpercayaan historis antar pemangku kepentingan, dan lain-lain (Ansell & Gash, 2018). Untuk mengatasi kendala ini, diperlukan upaya sosialisasi dan peningkatan kapasitas bagi para pemangku kepentingan dalam memahami nilai-nilai dan manfaat dari Collaborative Governance. Keterlibatan fasilitator pihak ketiga juga diperlukan untuk membangun kepercayaan dan mengelola ego sektoral dalam proses kolaborasi. Dengan menghadapi tantangan yang ada, diharapkan bahwa Collaborative Governance dapat meningkatkan efektivitas dan keseimbangan skema kemitraan multi-sektor dalam Program Public-Private Partnership (PPP) untuk mempercepat upaya pengentasan kemiskinan dan stunting di Indonesia.

C. Peluang dan Tantangan Skema Public-Private Partnership (PPP) di Indonesia

Kolaborasi pemerintah dan swasta dalam skema Public-Private Partnership (PPP) dinilai berpotensi meningkatkan pencapaian program pengentasan kemiskinan dan penurunan stunting di Indonesia (Kurniawan, 2007). Alasan dibalik hal ini adalah bahwa masing-masing sektor mempunyai sumber daya yang saling melengkapi dan keunggulan komparatif (Grimsey & Lewis, 2007). Pemerintah memiliki data mengenai individu yang hidup dalam kemiskinan dan mengalami stunting, yang dikategorikan berdasarkan nama dan alamat. Sebaliknya, sektor swasta memiliki modal, teknologi, dan jaringan operasional (Engel, Fischer & Galetovic, 2014). Dengan mengkolaborasikan potensi yang dimiliki oleh setiap pihak yang terlibat, upaya intervensi terhadap kemiskinan dan stunting dapat dilaksanakan dengan lebih efektif dan terarah (Hahm, Delmon & Wibisono, 2011).

Namun, tantangan utama dalam implementasi Public-Private Partnership (PPP) di Indonesia adalah belum optimalnya koordinasi antar pemangku kepentingan (Haqq & Gultom, 2021). Hal ini terjadi karena masih adanya ego sektoral dan perbedaan kepentingan yang menjadi hambatan dalam mencapai sinergi (Hans et.al, 2020). Sering kali terjadi ketidakberlanjutan dalam pelaksanaan program PPP dikarenakan kurangnya pemahaman mengenai tujuan dan pembagian peran yang jelas di antara pihak-pihak yang terlibat. Oleh karena itu, perlu adanya peningkatan koordinasi melalui forum lintas sektor guna menyelaraskan visi dan komitmen bersama.

Untuk mengatasi permasalahan ini, pendekatan Collaborative Governance dapat diterapkan untuk membentuk forum kolaboratif yang inklusif dan berorientasi pada konsensus dalam perencanaan dan evaluasi program PPP (Ansell & Gash, 2018). Dengan prinsip saling memahami motivasi dan ketergantungan antar pemangku kepentingan, diharapkan dapat tercipta komitmen bersama dan kepemimpinan kolektif yang mengarah pada peningkatan koordinasi dalam kemitraan publik-swasta yang lebih efektif (Solheim-Kile & Wald, 2019).

Selain itu, kelemahan yang terdapat pada basis data terpadu juga dianggap sebagai faktor yang menghalangi penggunaan sebagai sumber informasi yang dapat digunakan dalam proses perencanaan dan pemantauan Public-Private Partnership (PPP) (Ojelabi et.al, 2018). Dengan menerapkan prinsip Collaborative Governance, pertukaran informasi antarsektor dapat ditingkatkan, yang pada gilirannya akan meningkatkan kekompakan dan akurasi basis data. Hal ini bertujuan untuk memastikan intervensi yang tepat sasaran dalam kerjasama antara sektor publik dan swasta (Ansell & Gash, 2018). Aspek pembiayaan dan peran lembaga swadaya masyarakat (LSM) juga perlu diperkuat melalui pendekatan kolaboratif dan inklusif untuk menjamin keberlanjutan Public-Private Partnership (PPP). Peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam pengelolaan PPP, serta evaluasi program berbasis indikator yang disepakati bersama, sangat penting untuk memastikan bahwa PPP dapat memberikan hasil yang optimal dan berkelanjutan dalam mempercepat pengentasan kemiskinan dan mengatasi stunting di Indonesia.

Pembiayaan melalui Corporate Social Responsibility (CSR) dinilai belum optimal untuk kolaborasi program jangka panjang (Hidayat & Sutarjo, 2021). Hal ini terjadi karena sifat CSR yang tidak konsisten dan bergantung pada kebijakan perusahaan (frame, 2005). Berdasarkan pengalaman, beberapa program PPP terpaksa terhenti di tengah jalan karena menipisnya anggaran tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dari perusahaan mitra (Utting, 2005). Oleh sebab itu, Odia (2016) memberikan saran perlunya dirumuskan skema pembiayaan Public-Private Partnership (PPP) yang lebih berkelanjutan, seperti melalui skema kemitraan atau bantuan luar negeri.

Lemahnya partisipasi dan peran lembaga swadaya masyarakat (LSM) juga menjadi tantangan bagi implementasi Public-Private Partnership (PPP) di tingkat daerah (Ojelabi et.al, 2018). Situasi ini terjadi karena kurangnya upaya sosialisasi dan keterbatasan akses informasi mengenai program-program kemitraan antara pemerintah sektor dan swasta kepada lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan masyarakat di tingkat bawah (Swanson & Samy, 2002). Namun demikian, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dianggap memiliki

kelebihan dalam menggerakkan partisipasi masyarakat dan memberikan pendampingan kepada warga yang menerima manfaat dari program tersebut (Kennedy & Dornan, 2009). Berdasarkan hal tersebut, diperlukan melakukan sosialisasi yang lebih luas kepada Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan melibatkan mereka sejak tahap perencanaan guna mengatasi kesenjangan yang ada.

Temuan mengejutkan lainnya adalah kurangnya talenta pemerintah daerah dalam mengelola skema Public-Private Partnership (PPP) (Janssen et.al, 2016). Salah satu faktor yang menyebabkan hal tersebut adalah kurangnya pelatihan dan kapasitas dalam mengelola proyek kolaboratif (Yang et.al, 2021). Akibatnya sering kali terjadi hambatan dalam proses negosiasi dan koordinasi Public-Private Partnership (PPP). Oleh sebab itu, penting bagi pemerintah daerah untuk memprioritaskan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam manajemen Public-Private Partnership (PPP) untuk mengoptimalkan skema tersebut.

Evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Public-Private Partnership (PPP) selama ini juga dinilai kurang optimal (Osei-Kyei & Chan, 2017). Hal ini disebabkan oleh lemahnya sistem pemantauan dan kurangnya indikator kinerja program kemitraan pemerintah dan swasta yang telah disepakati bersama (Endo, Gianoli & Edelenbos, 2020). Akibatnya, sulit untuk menilai sejauh mana efektivitas dan dampak program Public-Private Partnership (PPP) dalam mengurangi angka kemiskinan dan mengatasi permasalahan stunting (Umar et.al, 2012). Karenanya, perlu dirancang kerangka pemantauan dan evaluasi program Public-Private Partnership (PPP) yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan dan mengatasi stunting, dengan memasukkan indikator-indikator yang terukur dan disepakati bersama.

D. Best Practise dalam Pengembangan Skema Public-Private Partnership (PPP)

Sejumlah praktik PPP yang baik juga berhasil diidentifikasi dalam studi ini. Salah satu contohnya adalah sinergi antara PT Semen Indonesia Group dan pemerintah daerah dalam program

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di sekitar lingkaran pertama pabrik mereka (Indrawati, Komara & Wijaya, 2012). Kemitraan ini dinilai berhasil meningkatkan akses terhadap pendidikan anak usia dini bagi keluarga kurang mampu secara ekonomi, sehingga memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan dan perkembangan mereka. Keberhasilan praktik-praktik tersebut didorong oleh adanya komitmen bersama, kontribusi nyata dari seluruh pihak yang terlibat, dan koordinasi yang efektif, sejalan dengan prinsip Collaborative Governance (Ansell & Gash, 2018).

Praktik baik lainnya adalah Program Kawasan Pangan Berkelanjutan (KRPL) yang dilaksanakan pemerintah bekerja sama dengan PT Nestle Indonesia. Skema kemitraan ini memanfaatkan pekarangan perumahan untuk budidaya sayuran organik melalui pemberian bibit, pelatihan, dan pendampingan teknis. Program ini terbukti meningkatkan ketahanan pangan dan swasembada rumah tangga sasaran yang sebelumnya mengalami kekurangan gizi. Keberhasilan program ini tidak terlepas dari metodologi yang tepat, kontribusi nyata dari mitra, dan kepemilikan bersama oleh penerima manfaat (Mahrunnisa, Agussabti & Kasimin, 2019).

Lebih lanjut, kemitraan antara PT YTL Jawa Timur dan pemerintah daerah dalam penyediaan air bersih di kawasan kumuh dinilai telah mencapai keberhasilan yang signifikan. Skema kolaborasi Build-Operate-Transfer (BOT) mempunyai kemampuan untuk meningkatkan akses terhadap air bersih bagi masyarakat miskin perkotaan yang sebelumnya kurang terlayani. Ini secara langsung berkontribusi pada peningkatan kualitas kesehatan dan produktivitas penduduk di wilayah tersebut. Salah satu faktor yang berkontribusi terhadap keberhasilannya terletak pada pemanfaatan keahlian teknis dari mitra swasta dan keterlibatan aktif masyarakat dalam pemeliharaan fasilitas (Amelinda & Kriswibowo, 2021).

Untuk mendorong pengembangan praktik-praktik baik ini, diperlukan forum kolaboratif yang inklusif untuk merumuskan model PPP partisipatif, dengan mempertimbangkan kebutuhan dan aspirasi pemangku kepentingan (Voinov, 2012). Melalui penerapan Collaborative Governance, diharapkan program-program Public-Private Partnership (PPP) ke depan dapat dirancang lebih canggih guna mengoptimalkan keterlibatan pihak swasta dalam

pemberdayaan ekonomi dan intervensi gizi, sehingga mempercepat pengentasan kemiskinan dan mengatasi stunting.

E. Public-Private Partnership (PPP) sebagai Akselerator Pengentasan Kemiskinan dan Stunting

Berdasarkan berbagai temuan di atas, dapat diasumsikan bahwa Public-Private Partnership (PPP) mempunyai potensi yang signifikan dalam mempercepat pengentasan kemiskinan dan mengatasi stunting di Indonesia. Namun demikian, untuk mencapai hasil yang optimal, perlu dirancang model kolaboratif yang sesuai dengan konteks lokal dan didukung oleh komitmen dan koordinasi yang baik dari seluruh pihak yang terlibat. Beberapa praktik terbaik yang ada dapat menjadi referensi awal untuk merumuskan model Public-Private Partnership (PPP) yang ideal untuk Indonesia. Dengan adanya desain yang terencana dengan baik, Public-Private Partnership (PPP) diyakini mampu mengatasi keseimbangan dan mempercepat pencapaian program pengurangan kemiskinan dan stunting di Indonesia.

Secara khusus, skema PPP untuk mempercepat pengentasan kemiskinan perlu mengoptimalkan peran sektor swasta dalam memberdayakan kemampuan ekonomi kelompok miskin melalui pelatihan keterampilan dan akses terhadap modal. Pentingnya hal ini perlu ditegaskan, mengingat pengangguran dan rendahnya produktivitas merupakan penyebab utama kemiskinan di Indonesia. Pengalaman empiris di India dan Bangladesh menunjukkan bahwa pemberdayaan ekonomi melalui Public-Private Partnership (PPP) telah berhasil meningkatkan pendapatan rumah tangga miskin secara signifikan. Oleh karena itu, disarankan agar skema serupa dapat diimplementasikan dan disesuaikan dengan kondisi lokal di setiap wilayah guna mengatasi permasalahan kemiskinan di Indonesia.

Skema PPP untuk mempercepat penurunan stunting harus memprioritaskan peningkatan akses gizi seimbang bagi ibu hamil dan anak balita dari keluarga miskin. Hal ini memiliki signifikansi yang sangat penting mengingat bahwa stunting terjadi akibat

Pessoa, A. (2006). Public-Private Sector Partnerships in Developing Countries: Prospects and Drawbacks. FEP Working Paper, (220).

Qodrina, H. A., & Sinuraya, R. K. (2021). FAKTOR LANGSUNG DAN TIDAK LANGSUNG PENYEBAB STUNTING DI WILAYAH ASIA: SEBUAH REVIEW. *Jurnal Kesehatan Vokasional*, 6(4), 1336-1344. <https://doi.org/10.33846/sf.v12i4.1336>

Rusliani, N., Hidayani, W. R., & Sulistyoningsih, H. (2022). Literature Review: Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Kejadian Stunting pada Balita. *Buletin Ilmu Kebidanan dan Keperawatan*, 1(1), 39-50. <https://doi.org/10.56741/bikk.v1i101.39>

Sanni, A. O., & Hashim, M. (2014). Building Infrastructure through Public Private Partnerships in Sub-Saharan Africa: Lessons from South Africa. *Procedia-Social and Behavioral Sciences*, 143, 133-138. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.07.374>

Solheim-Kile, E., & Wald, A. E. (2019). Extending the Transactional View on Public-Private Partnership Projects: Role of Relational and Motivational Aspects in Goal Alignment. *Journal of Construction Engineering and Management*, 145(9). [https://doi.org/10.1061/\(asce\)co.1943-7862.0001643](https://doi.org/10.1061/(asce)co.1943-7862.0001643)

Suleman, S. A., & Resnawaty, R. (2017). PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH): ANTARA PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGENTASAN KEMISKINAN. <https://doi.org/10.24198/jppm.v4i1.14213>

Swanson, B. E., & Samy, M. M. (2002). Developing an Extension Partnership among Public, Private, and Nongovernmental Organizations. *Journal of International Agricultural and Extension Education*, 9(1). <https://doi.org/10.5191/jiaee.2002.09101>

Umar, A. A., Idrus, A. B., Zawawi, N., & Khamidi, M. F. (2012). Improving Client Internal Capability to Monitor Public-Private Partnerships Projects: A Review. *American Journal of Engineering and Applied Sciences*, 5(3), 301-309.

Utting, P. (2005). Corporate responsibility and the movement of business. *Development in practice*, 15(3-4), 375-388. <https://doi.org/10.1016/j.devpol.2005.03.001>

org/10.1080/09614520500075797

- Voinov, A., & Bousquet, F. (2010). Modelling with stakeholders. *Environmental Modelling & Software*, 25(11), 1268-1281. <https://doi.org/10.1016/j.envsoft.2010.03.007>
- Wardhani, D. A. (2023). Pelaksanaan Public-Private Partnership dalam Perspektif Foreign Direct Investment untuk Pembangunan Infrastruktur. *Jurnal Pengadaan Barang/Jasa*, 2(1), 34-49. <https://doi.org/10.55961/jpbj.v2i1.34>
- Widdus, R. (2005). Public-private partnerships: an overview. *Transactions of the Royal Society of Tropical Medicine and Hygiene*, 99(1), S1-S8. <https://doi.org/10.1016/j.trstmh.2005.06.005>
- Yang, L., Sandanayake, M.S., Jayasuriya, S., Vu, H.T., & Zhang, G. (2021). Chinese Public-Private Partnership (PPP) Project Development Characteristics: An Interview Study. *Research Papers in Economics*, 879-895. https://doi.org/10.1007/978-981-15-8892-1_63.
- Yuda, A. K., Septina, Z., Maharani, A., & Nurdiantami, Y. (2023). Tinjauan Literatur: Perkembangan Program Penanggulangan Stunting di Indonesia. *Jurnal Epidemiologi Kesehatan Indonesia*, 2(1). <https://doi.org/10.7454/epidkes.v6i2.6049>
- Yurdakul, H., & Kamaşak, R. (2021). Public Private Partnership (PPP) as a Mechanism to Improve the Infrastructure Needs of Countries. In *The Future of Accessibility in International Higher Education* (pp. 275-299). IGI Global. <https://doi.org/10.4018/978-1-7998-4978-0.ch012>
- Zachwieja, J. J., Hentges, E. J., Hill, J. O., Black, R. M., & Vassileva, M. T. (2013). Public-private partnerships: the evolving role of industry funding in nutrition research. *Advances in Nutrition*, 4(5), 570-572. <https://doi.org/10.3945/an.113.004382>.

BAB 13
DINAMIKA
PENGUKURAN
KEMISKINAN

Zaula Rizky Atika, Chamid Sutikno

A. Konsep Pengukuran Kemiskinan di Indonesia

Kemiskinan masih menjadi masalah klasik pada beberapa negara berkembang. Indonesia merupakan negara yang mempunyai permasalahan kemiskinan cukup kompleks. Adanya kompleksitas ini terkadang mengakibatkan tumpang tindihnya program penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Salah satu cara untuk berhasil melaksanakan program penanggulangan kemiskinan yaitu dengan tercapainya ketepatan sasaran penerima program. Hal tersebut dapat terwujud dari konsep serta pengukuran kemiskinan yang tepat. Mengkonsep dan mengukur suatu kemiskinan akan memberikan pengaruh pada dasar kebijakan program penanggulangan kemiskinan.

Pengukuran kemiskinan di Indonesia dilakukan oleh beberapa lembaga pemerintahan dengan masing-masing pendekatan pengukurannya. Badan Pusat Statistik (BPS) memiliki dua pendekatan pengukuran kemiskinan dari hasil pengukuran makro dan mikro. Pendekatan moneter untuk pengukuran kemiskinan makro, sedangkan pendekatan karakteristik rumah tangga pada pengukuran kemiskinan mikro. Kemudian, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menggunakan pendekatan keluarga sejahtera dalam mengukur kemiskinannya. Selanjutnya ada Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)/ Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional mempunyai konsep pendekatan sendiri yang diambil dari konsep Sustainable Development Goals (SDGs). Lalu, Kementerian Sosial yang menggunakan pendekatan kesejahteraan sosial. Terakhir yakni adanya Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendesa) melalui Indeks Desa Membangun (IDM).

Perbedaan dari masing-masing lembaga pemerintahan diantaranya meliputi waktu pelaksanaan, sasaran, pendekatan, metode, penentuan penduduk miskin serta penentuan indikator-indikator kemiskinannya. Melihat angka kemiskinan perlu hati-hati, mencermatinya dari berbagai perspektif itu perlu. Apabila dipantau dari pertumbuhan ekonominya didapatkan hasil yang relatif baik, belum tentu hasilnya sama ketika dilihat dari indikator sosial.

B. Pengukuran Kemiskinan dengan Pendekatan Moneter dan Karakteristik Rumah Tangga (Versi BPS)

Pengukuran kemiskinan versi BPS dibedakan menjadi dua macam, secara makro dan mikro. Pengukuran kemiskinan makro atau absolut dimulai sejak tahun 1976 menggunakan data dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), sebagai informasi tambahan digunakan pula data dari Survei Paket Komoditi Kebutuhan Dasar (SPKKD). Adapun metode yang digunakan yaitu melalui pendekatan moneter. Pendekatan ini melihat berdasarkan pengeluaran konsumsi rumah tangga dengan mempertimbangkan setiap anggota rumah tangga (nantinya disebut pengeluaran per kapita).

Indikator kemiskinan yang dihasilkan dari pengukuran kemiskinan secara makro diantaranya adalah persentase penduduk miskin, yaitu persentase penduduk yang pengeluarannya berada di bawah garis kemiskinan (disebut P_0 /Head Count Index), jumlah penduduk miskin, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1 /Poverty Gap Index), Indeks Keparahan Kemiskinan (P_2 /Poverty Severity Index). Setelah menentukan pengeluaran per kapita, langkah selanjutnya adalah membangun standar minimum untuk membagi penduduk menjadi miskin dan tidak miskin. Standar minimum ini sering dikenal sebagai Garis Kemiskinan (GK) yang merupakan nilai pengeluaran untuk kebutuhan minimum makanan dan bukan makanan per kapita per bulan. Keberadaan kebutuhan dasar minimum dapat dikatakan sebagai ukuran finansial dalam bentuk uang. Penduduk yang pendapatannya di bawah garis kemiskinan tadi nantinya digolongkan sebagai penduduk miskin.

Pengukuran kemiskinan mikro telah dilakukan BPS sejak tahun 2005 dengan nama Pendataan Sosial Ekonomi (PSE05). Adanya PSE05 merupakan data level individu pertama yang tersedia sebagai dasar dari program-program perlindungan sosial dalam rangka mengurangi jumlah penduduk miskin. Pada saat itu keberadaan PSE05 dimaksudkan untuk mendapatkan data rumah tangga penerima BLT (Bantuan Langsung Tunai). Setelah kegiatan PSE05, tahun 2007 BPS juga melakukan pengukuran kemiskinan lagi bernama Survei Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan 2007

(SPDKP07). Kegiatan SPDKP07 merupakan basis data untuk calon penerima bantuan tunai melalui Program Keluarga Harapan (PKH). Bulan September tahun 2008, BPS melakukan Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS08) tujuannya untuk memperbarui data PSE05 dan SPDKP07. Kemudian bulan Juli tahun 2011, BPS melaksanakan lagi Pendataan Program Perlindungan Sosial 2011 (PPLS11) untuk memperoleh informasi rumah tangga miskin yang digunakan sebagai Basis Data Terpadu (BDT) dalam program bantuan dan perlindungan sosial tahun 2012-2014.

Penentuan sasaran dalam kegiatan-kegiatan pengukuran kemiskinan tersebut didasarkan pada pendekatan karakteristik rumah tangga, bukan dengan pendekatan nilai konsumsi pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan dasar minimum seperti pada data kemiskinan makro. Penentuan kategori rumah tangga penerima program bantuan dan perlindungan sosial menggunakan metode sistem skoring, yaitu setiap variabel diberi skor berupa bobot yang didasarkan pada besarnya pengaruh dari setiap variabel terhadap kemiskinan. Jumlah variabel serta besarnya bobot berbeda disetiap kabupaten. Bobot masing-masing variabel terpilih pada setiap kabupaten/kota dihitung indeks skor rumah tangga penerima, selanjutnya indeks diurutkan dari terbesar sampai terkecil, semakin tinggi nilainya maka semakin miskin rumah tangga tersebut.

C. Pengukuran Kemiskinan dengan Pendekatan Keluarga Sejahtera (Versi BKKBN)

Pengukuran kemiskinan versi BKKBN telah dilakukan sejak tahun 1994. Tujuannya adalah menyediakan informasi serta data keluarga sebagai dukungan dalam pelaksanaan operasional dan manajemen Program Kependudukan Keluarga Berencana Nasional. Pengukuran kemiskinan tersebut diharapkan dapat menghasilkan data yang berkualitas, akurat, tepat waktu, terpercaya, memberikan gambaran yang tepat dan menyeluruh tentang keadaan di lapangan. Pengukuran kemiskinan BKKBN menggunakan aspek keluarga sejahtera.

Aspek keluarga sejahtera terdiri dari empat sub aspek berupa Aspek Demografi, Aspek Keluarga Berencana, Aspek Tahapan Keluarga Sejahtera, Aspek Individu Anggota Keluarga. Adapun aspek keluarga sejahtera ini dikumpulkan dengan menggunakan 13 variabel yang meliputi 21 indikator sesuai pemikiran para pakar sosiologi dalam membangun keluarga sejahtera. Faktor-faktor dominan yang menjadi kebutuhan setiap keluarga diantaranya terdiri dari kebutuhan dasar, kebutuhan sosial psikologis, kebutuhan pengembangan, serta kebutuhan aktualisasi diri dalam berkontribusi bagi masyarakat di lingkungannya. Pengukuran kemiskinan versi BKKBN tersebut nantinya menghasilkan lima tingkatan kesejahteraan, yakni tahap Keluarga Prasejahtera, Keluarga Sejahtera I, Keluarga Sejahtera II, Keluarga Sejahtera III dan Keluarga Sejahtera III Plus.

D. Pengukuran Kemiskinan dengan Pendekatan Sustainable Development Goals/SDGs (Versi BAPPENAS)

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) adalah Agenda 2030 yang merupakan kesepakatan pembangunan berkelanjutan berdasarkan hak asasi manusia dan kesetaraan. Kesepakatan tersebut berprinsip universal, integrasi dan inklusif. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ Sustainable Development Goals (SDGs) adalah pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Sebagai komitmen global dan nasional, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) mengupayakan untuk menyejahterakan masyarakat mencakup 17 tujuan yaitu (1) Tanpa Kemiskinan; (2) Tanpa Kelaparan; (3) Kehidupan Sehat dan Sejahtera; (4) Pendidikan Berkualitas; (5) Kesetaraan Gender; (6) Air Bersih dan Sanitasi Layak; (7) Energi Bersih dan Terjangkau; (8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan

Ekonomi; (9) Industri, Inovasi dan Infrastruktur; (10) Berkurangnya Kesenjangan; (11) Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan; (12) Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab; (13) Penanganan Perubahan Iklim; (14) Ekosistem Lautan; (15) Ekosistem Daratan; (16) Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh; dan (17) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.

Indonesia telah berhasil mencapai sebagian besar target MDGs Indonesia yaitu 49 dari 67 indikator MDGs, namun demikian masih terdapat beberapa indikator yang harus dilanjutkan dalam pelaksanaan TPB/SDGs. Beberapa indikator yang harus dilanjutkan tersebut antara lain penurunan angka kemiskinan berdasarkan garis kemiskinan nasional, peningkatan konsumsi minimum di bawah 1.400 kkal/kapita/hari, penurunan Angka Kematian Ibu (AKI), penanggulangan HIV/AIDS, penyediaan air bersih dan sanitasi di daerah perdesaan serta disparitas capaian target antar provinsi yang masih lebar.

Kementerian PPN/Bappenas dalam melaksanakan TPB/SDGs bersama dengan Kementerian/Lembaga, Ormas dan Media, Filantropi dan Pelaku Usaha serta Akademisi dan Pakar perlu merumuskan Rencana Aksi (Renaksi) TPB/SDGs sebagai acuan bagi seluruh pemangku kepentingan baik di tingkat nasional (Rencana Aksi Nasional/RAN) maupun di tingkat daerah (Rencana Aksi Daerah/RAD). Renaksi TPB/SDGs adalah dokumen rencana kerja 5 (lima) tahunan untuk pelaksanaan berbagai kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung mendukung pencapaian target nasional dan daerah. Dengan renaksi tersebut diharapkan pihak-pihak terkait ditingkat nasional dan daerah memiliki komitmen dan kejelasan dalam perencanaan dan penganggaran program, serta kegiatan untuk mencapai sasaran TPB/SDGs.

Sebagai upaya untuk memudahkan pelaksanaan dan pemantauan, 17 Tujuan dan 169 target TPB/SDGs dikelompokkan ke dalam empat pilar diantaranya, 1) Pilar pembangunan sosial: meliputi Tujuan 1, 2, 3, 4 dan 5; kemudian 2) Pilar pembangunan ekonomi: meliputi Tujuan 7, 8, 9, 10 dan 17; selanjutnya 3) Pilar pembangunan lingkungan: meliputi Tujuan 6, 11, 12, 13, 14 dan 15; serta yang terakhir 4) Pilar pembangunan hukum dan tata kelola: meliputi Tujuan 16 (<https://sdgs.bappenas.go.id>).

E. Pengukuran Kemiskinan dengan Pendekatan Kesejahteraan Sosial (Versi Kementerian Sosial)

Komitmen dari Kementerian Sosial adalah untuk mempromosikan taraf kesejahteraan sosial bagi seluruh penduduk Indonesia. Mereka yang mengalami keterbatasan dalam mengakses potensi serta sumber daya kesejahteraan sosial karena adanya hambatan sosial psikologis pada siklus hidupnya disebut dengan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Menurut Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No.8 Tahun 2012 terdapat 26 jenis individu perorangan, keluarga atau kelompok masyarakat yang termasuk golongan PMKS diantaranya anak balita terlantar, anak terlantar, anak yang berhadapan dengan hukum, anak jalanan, anak disabilitas, anak korban tindak kekerasan, anak yang memerlukan perlindungan khusus, lanjut usia telantar, penyandang disabilitas, tuna susila, gelandangan, pengemis, pemulung, kelompok minoritas, bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan, orang penderita HIV/AIDS (ODHA), korban penyalahgunaan NAPZA, korban trafficking, korban tindak kekerasan, pekerja migran bermasalah sosial, korban bencana alam, korban bencana sosial, perempuan rawan sosial ekonomi, fakir miskin, keluarga bermasalah sosial psikologis dan komunitas adat terpencil. Penentuan PMKS tersebut dilihat berdasarkan faktor demografi, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, serta sosial ekonomi.

Sebagaimana dalam Undang-undang RI No.11 Tahun 2009 menjelaskan tentang kesejahteraan sosial, dimana kesejahteraan sosial merupakan kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan warga negara agar dapat hidup layak serta mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Berdasarkan hal tersebut, konsep kesejahteraan sosial sekaligus dijadikan sebagai pendekatan dalam pengukuran kemiskinan versi Kemensos.

Pengukuran kemiskinan versi Kemensos dilaksanakan melalui kerjasama dengan BPS dalam Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). Penentuan PMKS dapat diketahui dari kuesioner Kor serta kuesioner Modul Sosial Budaya dan Pendidikan. Kuesioner

pengukuran kemiskinan. Upaya menciptakan indikator khusus terkait pengukuran kemiskinan berbasis locality diharapkan dapat menyoar kepada orang-orang yang tepat.

H. Referensi

Bappenas/ Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional. (2017). Ringkasan Metadata Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ Sustainable Development Goals (SDGs) Indonesia

BKKBN. (2013). Profil Hasil Pendataan Keluarga.

Basis Data Terpadu Tahun 2011 dan 2013.

Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan Kemendes. (2023). Panduan Indeks Desa Membangun.

Hasil Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) Tahun 2011.

Kementerian Sosial. (2011). Profil Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Indonesia.

DILINDUNGI UU NO. 28 TAHUN 2014
DILARANG DIGANDAKAN DAN DISEBARLUASKAN

PROFIL PENULIS

Editor:

Shadu Satwika Wijaya, adalah dosen pada Jurusan Administrasi Publik, FISIP, Universitas Jenderal Soedirman. Penulis telah aktif dalam kegiatan ilmiah terutama dalam kegiatan penelitian, menjadi anggota tim peneliti pada Read's Consulting, Sejak 2015, pernah menjadi tim Ahli pada DPRD kabupaten Wonosobo (2013-2016). Beberapa publikasi ilmiah yang dihasilkan antara lain : Apakah Partisipasi Masyarakat Dapat Mencegah Korupsi ? Jurnal Ilmu Administrasi Negara ASIAN (2022); Policy Change: Refocusing Local Government Budgets in Response to Covid-19(Prosiding pada KnE Social Sciences,2022); BUMDes: Model Pergseran Paradigma Pengelolaan Potensi Desa, (Dinamika Governance Jurnal Ilmu Administrasi Negara, 2022); Formulasi Kebijakan Pembangunan Di Desa Dermaji Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas, (Public Policy and Management Inquiry,2021); Impact of a Free Public Transportation Service for Rural Households,(Masyarakat, Kebudayaan dan Politik, 2020.

Guntur Gunarto adalah dosen pada Jurusan Administrasi Publik, FISIP, Universitas Jenderal Soedirman, Menyelesaikan Program magisternya dalam bidang Administrasi Publik dari Universitas Jenderal Soedirman. Memiliki minat dalam Kajian Administrasi Pemerintahan Daerah. Aktif dalam mengawal perumusan kebijakan publik dan peraturan daerah di berbagai Kabupaten dan Kota yang ada di Wilayah Jawa Tengah. Aktif mengikuti kegiatan ilmiah seminar baik nasional maupun internasional.

Lilis Sri Sulistiani, Adalah Dosen pada Jurusan Administrasi Publik, Pendidikan S1 Program Studi Administrasi Publik Fisip Unsoed Tahun 1992, Program Studi Magister Manajemen FEB Unsoed Tahun 2001. Penulis memiliki minat pada kajian Manajemen Sumber Daya Manusia dan Keuangan Negara. Tulisan terbaru berupa telah dipublikasikan “Administrasi Publik New Normal” tahun 2020 dan Jurnal internasional “Effectiveness Analysis of the Employee Work Performance Assessment System –A Critical Three-Component Approach” tahun 2022

Kontributor:

Muslih Faozanudin, adalah dosen pada program Studi S1 dan S2 Administrasi Publik FISIP Universitas Jenderal Soedirman. Memperoleh Gelas Master dari Birmingham University, UK pada tahun 1998, dan Gelar dokturnya dari Universitas Padjajaran, Bandung pada tahun 2013. Penulis memiliki minat dalam Kajian Manajemen Pelayanan dan Sektor Publik, manajemen pembangunan Perdesaan, dan Pengembangan Kapasitas. Beberapa karya dalam bentuk Book Chapter yang telah ditulis antara lain: Inovasi Pelayanan Sektor Publik: Tantangan Pada Era New Normal (2020); Membangun Pelayanan Public di Desa Berbasis e-government melalui Inovasi(2021); diskursus pemberdayaan dan Pembangunan (2022). Manajemen e-Government (2023).

Darmanto Sahat Styawan, adalah dosen senior pada Jurusan administrasi publik, Fisip, Universitas Jenderal Soedirman. Lahir di Medan - Sumatra Utara pada tahun 1961. Meraih pendidikan S1 pada Fakultas Fisip, UNS dan S2 ditempuh pada Universitas Airlangga Surabaya dan pada Program Pascasarjana - Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto. Beberapa tulisan yang pernah dipublikasikan antara lain: Model Implementasi PNPM Mandiri Perdesaan Di Kabupaten Banyumas (2012); “Web Usability of Public Organization Websites (The Case of Indonesian Ministry Websites (2012); Hasil Uji Implementasi PNPM Mandiri Perdesaan Kabupaten Banyumas (2014); Mewujudkan Demokrasi yang Mensejahterakan Di Indonesia” dalam Rangka Dies Natalis FISIP UNSOED XXVI (2011); International Conference on Public Organization (ICONPO) (2012); International Conference on Public Management (2013).

Sukarso, adalah Dosen senior pada Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jenderal Soedirman. Gelar doktor dalam bidang administrasi publik diperoleh dari Universitas Padjajaran Bandung tahun 2012. Saat ini penulis menjabat sebagai Ketua Laboratorium lembaga Kajian kebijakan dan Pembangunan, FISIP, Universitas Jenderal Soedirman (2019-Sekarang). Penulis memiliki minat yang kuat dalam kajian teori administrasi publik, Kebijakan publik, governansi publik, etika administrasi publik dan metode penelitian administrasi publik, baik dalam bentuk penelitian maupun pengajaran. Penelitian-penelitian yang dilakukan banyak sekitar tentang Implementasi dan evaluasi program/Kebijakan pembangunan, perumusan anggaran pendapatan dan belanja daerah dan desa, penggunaan media sosial di masyarakat desa. Beberapa karya ilmiah yang diterbitkan dalam beberapa jurnal ilmiah, dan dalam book chapter.

Niken Paramarti Dasuki, adalah dosen pada Jurusan Sosilogi, FISIP, Universitas Jenderal Soedirman, Pendidikan Magisternya diperoleh pada tahun 2012, dari Universitas Padjajaran Bandung. Penulis memiliki minat dalam bidang kajian Sosiologi Kemiskinan, karya-karyanya banyak terkait dengan fenomena kemiskinan yang ada di masyarakat dari sudut pandang ekonomi, budaya dan sosial politik termasuk penggunaan dan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi. Hasil karya ilmiahnya juga banyak dideseminasikan melalui kepesertaan dalam seminar baik nasional dan internasional dan dalam jurnal Ilmiah nasional dan internasional.

Bambang Tri Harsanto, adalah Dosen Pada proram Studi S1 dan S2 Administrasi Publik Fisip Universitas Jenderal Soedirman. Memperoleh gelar doktor dari Institut Pertanian Bogor pada Program Studi Ilmu Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Perdesaan. Penulis memiliki keahlian pada bidang Kajian Perencanaan dan pembangunan wilayah. Kegiatan penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat lebih banyak fokus pada bidang perencanaan, pembangunan dan pengembangan wilayah. Beberapa hasil karya penelitian telah dipublikasikan pada jurnal nasional dan internasional, antara lain: Format Kelembagaan Kerjasama Antar daerah Untuk Pembangunan Ekonomi Kawasan Berkelanjutan, (Jurnal MIMBAR, 2015); Penguatan Kelembagaan Kelurahan

Pasca Implementasi UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Jurnal Masyarakat, Kebudayaan dan Politik, 2017); A Semi Autonomous Model to Strengthen the Lowest Bureaucracy: A Case Study in Wonosobo Regency, Central java, Indonesia, (Mediterranean Journal of Social Sciences, 2018); Determinants of Performance of Village Government in Early Implementation of Village Law, (Journal of Governance, December 2020); The Competence-Based Development of Village Government Personnel towards Superior and Independent Villages in Banyumas Regency, Indonesia (International Journal of Current Science Research and Review, 2022); Building A Rural Economic Area Through Cooperation Between Villages: A Case Study of Agrotourism-Based Rural Area Development in Banyumas Indonesia, (Jurnal Wilayah dan Lingkungan, 2022)

Dyah Wahyu Nastiti, Dyah Wahyu Nastiti dilahirkan di Purwokerto 6 Agustus 1992. Pada tahun 2021 penulis berhasil menyelesaikan pendidikan pada Program Master (S2) Sains Manajemen di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Saat ini penulis merupakan Asisten Akademik pada Program Magister dan Doktor FEB UGM

Simin, Dosen pada Program Studi Administrasi Publik, Menamatkan Pendidikan S2 di Universitas Brawijaya Malang tahun 1999. Pernah menjabat sebagai Sekretaris Jurusan Administrasi publik (periode 2018 s.d. 2021). Bidang kajian yang diminati adalah Administrasi Pemerintahan Daerah, beberapa karya ilmiah telah diterbitkan pada Jurnal Nasional antara lain: Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Desa Sokaraja Kidul, terbit pada Jurnal Ilmu Administrasi Negara (AsIAN), tahun 2020; Partisipasi Forum Anak Banyumas dalam Mewujudkan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Banyumas Ditinjau dari Perspektif Multi Stakeholder Partnerships (Jurnal Desentralisasi dan Kebijakan Publik (JDKP), 2021); A Semi-Autonomous Model to Strengthen the Lowest Bureaucracy: A Case Study in Wonosobo Regency, Central Java, Indonesia, (Mediterranean Journal of Social sciences, 2019); Rural Budgeting Organization In Indonesia: Human Development Or Physical Infrastructure?(The International Journal of Social Sciences and Humanities Invention, 2020); Does Decentralization

Improve The Participatory Process Of Rural Development Planning ? (International Journal of Scientific & Technology Research,2021

Darmanto Sahat Satyawan, adalah dosen senior pada Jurusan administrasi publik, Fisip, Universitas Jenderal Soedirman. Lahir di Medan - Sumatra Utara pada tahun 1961. Meraih pendidikan S1 pada Fakultas Fisip, UNS dan S2 ditempuh pada Universitas Airlangga Surabaya dan pada Program Pascasarjana - Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto. Beberapa tulisan yang pernah dipublikasikan antara lain: Model Implementasi PNPM Mandiri Perdesaan Di Kabupaten Banyumas (2012); "Web Usability of Public Organization Websites (The Case of Indonesian Ministry Websites (2012); Hasil Uji Implementasi PNPM Mandiri Perdesaan Kabupaten Banyumas (2014); Mewujudkan Demokrasi yang Mensejahterakan Di Indonesia" dalam Rangka Dies Natalis FISIP UNSOED XXVI (2011); International Conference on Public Organization (ICONPO) (2012); International Conference on Public Management (2013).

Sendy Noviko, adalah dosen pada Jurusan Administrasi Publik, FISIP, Universitas Jenderal Soedirman, Menyelesaikan Program magisternya dalam bidang Administrasi Publik dari Universitas Gajah Mada. Memiliki minat dalam Kajian Kebijakan Publik. Penulis juga aktif dalam mengawal perumusan kebijakan publik dan peraturan daerah di berbagai Kabupaten dan Kota yang ada di Wilayah Jawa Tengah. Aktif mengikuti kegiatan ilmiah seminar baik nasional maupun internasional. Beberapa karya ilmiahnya diterbitkan dalam jurnal nasional dan internasional.

Tobirin, dosen pada Jurusan Administrasi Publik Fisip Universitas Jenderal Soedirman. Menyelesaikan Studi Sarjana pada Administrasi Negara, FISIP Universitas Jenderal Soedirman tahun 2000, Magister pada Administrasi negara UGM tahun 2004 dan Doktor pada MKP UGM tahun 2019. Saat ini penulis menjabat sebagai Ketua Jurusan Administrasi Publik, sejak tahun (2021 sampai sekarang). Penulis aktif dalam mengawal perumusan kebijakan publik dan Peraturan Daerah di berbagai Wilayah di Barlingmascakeb sampai Sekarang. Berperan serta dalam kajian tentang daerah kepulauan bersama DPD RI tahun 2012. Aktif dalam kajian Pengembangan Teknologi Pedesaan LPPM UNSOED tahun 2012 sampai 2014. Mengisi Mimbar Pedesaan RRI Purwokerto

tentang rekayasa Sosial dan Pembanguann tahun 2013. Dan dialog bersama KPK tentang inovasi Pajak daerah tahun 2020. Selain itu menjadi Tim Kajian implementasi pelaksanaan Pancasila di Indionesia tahun 2018-2019 Bersama Lembaga pengkajian MPR-RI. Penulis punya karya yang de terbitkan dalam Buku Administrasi Negara Kontemporer (Book Chapter, Aneka ilmu 2011) Buku TTG pemberdayaan KSM dan Komunitas Zero Waste dalam mengatasi Sampah Rumah Tangga, SIP Publishing tahun 2020. Penulis juga menerbitkan karya ilmiahnya pada beberapa jurnal ilmiah antara lain: pada jurnal sinta 2 palastren, dengan Judul Kebijakan Rumah Perempuan dalam Merespon Antagonisme Industri Rambut Bulu dan Bulu Mata Palsu di Kabupaten Purbalingga; 'The Vulnerability of Male Gender and State Response in the Female Labor Protection Policy: A Case Study of New Industrial Communities in Purbalingga Regency' (Policy & Governance Review). Menjadi the best paper dalam The 3rd International Conference on Social Transformation Community, and sustainable Development 2019, dengan Judul "The Succes of Collaborative Governance to Protect Communities from Infection Disease in Wonosobo Regency", Juga aktif terlibat dalam aktivitas Sosial sebagai pendidri dan Ketua Yayasan Rumah Peradaban tahun 2018-sekarang. Pendiri "Indonesia for Bureaucratic Reform" (Inbrief) tahun 2020). Aktif juga dalam Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat dalm kegiatan zero waste Indonesia dan kajian penelitian tentang gender dan kebijakan publik.

Diah Setyorini Gunawan, lahir pada tanggal 9 Juni 1981 di Purwokerto. Penulis meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Jenderal Soedirman pada tahun 2003, gelar Magister Sains dari Universitas Gadjah Mada pada tahun 2006, dan gelar Doktor dari Universitas Gadjah Mada pada tahun 2015. Penulis adalah staf pengajar di Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jenderal Soedirman. Selain sebagai staf pengajar, penulis juga aktif melakukan penelitian, publikasi, dan menjadi tenaga ahli di beberapa kegiatan penyusunan dokumen kajian yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Penulis juga telah menghasilkan beberapa buku yang meliputi Peluang Usaha UMKM (2022); Project Digital: E-Marketplace Melalui Penerapan Inovasi Teknologi (2022); dan Ragam Pemikiran Pembangunan Ekonomi Perdesaan (2023).

Rifda Naufalin, Lahir di Kudus pada 1970. Pendidikan kesarjanaan diselesaikan di Fakultas Pertanian, Jurusan Teknologi Hasil Pertanian, Universitas Jenderal Soedirman. Berkesempatan studi S2 di Program Pascasarjana Institut Pertanian Bogor, Bidang Ilmu Pangan. Gelar Doktor diperoleh dari Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor (2002-2005) bidang Ilmu Pangan. Bekerja sebagai staff pengajar di Fakultas Pertanian Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto sejak tahun 1995 hingga sekarang. Mengajar beberapa mata kuliah, yakni Kimia Pangan, Mikrobiologi Dasar, Mikrobiologi Pangan, Analisis Pangan, dan Manajemen Mutu Keamanan Pangan.

Denok Kurniasih, adalah Dosen Jurusan Administrasi Publik, Fisip Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto. Perempuan yang lahir pada tanggal 1 Mei 1979 memperoleh gelar doktor dari Universitas Padjajaran Bandung, Pada program Doktor Ilmu Administrasi Publik. Saat ini penulis menjabat sebagai Koordinator Program Studi Magister Administrasi Publik (MAP), Fisip UNSOED. Penulis memiliki bidang keahlian pada manajemen publik. Penelitiannya banyak berfokus pada kajian manajemen publik seperti governansi publik, manajemen risiko sektor publik, business government, manajemen pelayanan publik, public Private Partnership, dan isu-isu organisasi publik. Beberapa hasil penelitiannya telah dipublikasikan dalam bentuk prosiding seminar, jurnal ilmiah baik nasional maupun internasional, serta produk luaran lainnya dalam bentuk Kekayaan Intelektual.

Paulus Israwan Setyoko, adalah Guru Besar dalam bidang kajian Kebijakan Publik pada Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto. Penulis mengawali karirnya sebagai dosen sejak tahun 1986 sampai sekarang. Belajar Administrasi Negara di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Karya ilmiah terbaru antara lain: Policy Change: Refocusing Local Government Budgets in Response to Covid-19, (Kne Social Sciences, 2022); Implementation of Local Regulations Banyumas No. 6 of 2019 on Detailed Plans Purwokerto Urban Area Layout, (Jurnal Administrasi Negara, 2022); dan The Role of Social Media Exposure Frequency, Sustainability Valuation and Entrepreneurship Intention on Entrepreneurship Sustainability

of Undergraduate Students, (Journal of Social and Management Studies, 2022).

Hikmah Nuraini, adalah Dosen pada Program Studi Sarjana Administrasi Publik FISIP UNSOED Universitas Jenderal Soedirman. Hikmah Nuraeni menamatkan pendidikan S3 Pada program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang, Pada Program Administrasi Publik pada tahun 2021. Saat ini Hikmah Nuraini menjabat sebagai Sekretaris Jurusan Administrasi Publik Fisip Unsoed, sejak 2022. Bidang Kajian yang ditekuni adalah pembangunan pemberdayaan Masyarakat. Beberapa karya ilmiah yang diterbitkan antara lain : Collaborative Governance In Mobilizing Vilage Owned Enterprises (Bumdes) During Covid-19 Pandemic In Indonesia; Pengembangan Smart Village Sebagai Upaya Menjalankan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Wahyuningrat, adalah dosen pada Jurusan Administrasi Publik, FISIP, Universitas Jenderal Soedirman, Menyelesaikan Program doktornya dalam bidang Administrasi Publik pada tahun 2015 dari Universitas Brawijaya Malang. Menjabat sebagai Dekan FISIP-peride (2021-2025). Memiliki minat dalam Kajian Manajemen Sumber daya Manusia, dan Manajemen Sektor publik. Penulis juga aktif dalam mengawal perumusan kebijakan publik dan peraturan daerah di berbagai Kabupaten dan Kota yang ada di Wilayah Jawa Tengah. Aktif mengikuti kegiatan ilmiah seminar baik nasional maupun internasional. Beberapa karya ilmiahnya diterbitkan dalam jurnal nasional dan internasional.

Slamet Rosyadi, adalah Dosen Associate Professor pada Program Studi S1 dan S2 Administrasi publik Fisip Universitas Jenderal Soedirman. Memperoleh gelar doktor dari Institute of Rural Development, Goettingen University, Jerman pada tahun 2003. Penulis memiliki minat penelitian pada isu-isu governansi publik, ekonomi kreatif dan pembangunan desa. Beberapa karyanya telah terbit dalam jurnal nasional maupun internasional, diantaranya Jurnal Bisnis & birokrasi, Masyarakat, Kebudayaan dan Politik, Sage Open, Kasetsart Journal of Social Science, dan International Journal of Law and Management. Beberapa buku telah disuntingnya dalam dua tahun terakhir: Pengantar Manajemen Publik, Administrasi Publik New Normal, dan Administrasi Publik di Era Disrupsi dan

Big Data. Disamping aktivitas mengajar, penulis juga terlibat dalam beberapa kegiatan pengabdian kepada masyarakat khususnya dalam pengembangan kapasitas manajemen bank sampah, penyusunan naskah akademik beberapa peraturan daerah, dan pendampingan inovasi pelayanan publik di Kabupaten Banyumas dan Cilacap.

Muhammad Yamin, adalah dosen program studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto. Riwayat pendidikan S1 pada Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Muhammadiyah, Yogyakarta (1999), pendidikan S2 pada Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (2004) dan Pendidikan S3 Hubungan Internasional di Universitas Padjadjaran, Bandung. Dengan minat kajian di bidang Pembangunan, Pariwisata, Keamanan, Lingkungan dan Energi. Beberapa karya yang telah dihasilkan diantaranya, Buku Intelijen Indonesia: Towards to Professional Intelligence (2006) dan Buku Teori Pembangunan Internasional (2016). Korespondensi lebih lanjut melalui email: muhammad.yamin@unsoed.ac.id.

Agus Ganjar Runtiko, saat ini tercatat sebagai pengajar di Prodi S1 Ilmu Komunikasi Unsoed, Prodi Magister Ilmu Komunikasi Unsoed, UIN Syaifuddin Zuhri Purwokerto, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, Universitas Terbuka, dan dosen tamu di Universitas Brawijaya Malang, dengan peminatan pada kajian komunikasi pembangunan berkelanjutan. Selain aktif mengajar, penulis juga melakukan kegiatan pengabdian masyarakat; antara lain sebagai chief editor jurnal ilmiah Acta Diurna, reviewer di beberapa jurnal ilmiah ilmu komunikasi, pegiat literasi digital Tular Nalar, dan pendampingan kegiatan komunikasi pembangunan di wilayah Banyumas dan sekitarnya. Penulis dapat dihubungi melalui email: agus.runtiko@unsoed.ac.id.

Alizar Isna, adalah seorang dosen yang berdedikasi di program studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) di Universitas Jenderal Soedirman. Merupakan lulusan dari Universitas Brawijaya, Alizar Isna telah mengukir jejaknya dalam dunia akademis dengan pengetahuan dan pengalamannya yang luas di bidang Administrasi Publik. Alizar Isna memiliki minat khusus dalam Kebijakan Publik, yang mencerminkan fokusnya pada

pemahaman mendalam terhadap proses perumusan, implementasi, dan evaluasi kebijakan di berbagai tingkatan pemerintahan. Dalam kapasitasnya sebagai dosen, beliau membawa semangat dan pengetahuan yang mendalam ke dalam kelas, memberikan mahasiswa pemahaman yang kokoh tentang kompleksitas isu-isu kebijakan publik.

Vellayati Hajad, adalah seorang akademisi dan dosen di Universitas Teuku Umar, Aceh, yang memiliki latar belakang akademis tinggi dengan gelar Doktor dalam bidang Ilmu Politik. Sebagai seorang intelektual yang berdedikasi, Vellayati Hajad memiliki minat penelitian yang khusus dalam dua bidang utama, yaitu Kebijakan Publik dan Ekonomi Politik. Dengan keahliannya dalam Ilmu Politik, Vellayati Hajad tidak hanya memberikan wawasan yang mendalam kepada mahasiswa-mahasiswa di Universitas Teuku Umar, tetapi juga aktif terlibat dalam kegiatan penelitian untuk memperdalam pemahaman tentang dinamika kebijakan publik dan interaksi kompleks antara politik dan ekonomi. Vellayati Hajad juga merupakan kontributor berharga dalam dunia akademis, memberikan pemikiran dan pandangannya yang berharga melalui publikasi-publikasi ilmiahnya. Keberhasilannya dalam mengeksplorasi aspek-aspek penting dalam Kebijakan Publik dan Ekonomi Politik memberikan kontribusi positif terhadap pemahaman kita tentang dinamika kompleks yang membentuk kebijakan dan proses politik di tingkat lokal maupun nasional. Bagi mereka yang ingin berkomunikasi atau berkolaborasi dengan Vellayati Hajad, beliau dapat dihubungi melalui surel di vellayati.hajad@utu.ac.id. Dengan pengalaman akademis dan penelitiannya yang kaya, Vellayati Hajad menjadi sumber inspirasi dan pengetahuan yang berharga bagi komunitas akademis serta masyarakat umum yang tertarik dengan Ilmu Politik, Kebijakan Publik, dan Ekonomi Politik.

Ikhsan, adalah seorang dosen di Universitas Teuku Umar, Aceh. Sebagai seorang akademisi yang berdedikasi, Ikhsan Baharudin memiliki minat penelitian yang utama dalam dua bidang kajian yang sangat relevan, yaitu Pemerintahan Daerah dan Pengentasan Kemiskinan. Sebagai seorang pakar dalam Ilmu Pemerintahan, tidak hanya menyampaikan pengetahuan dan pengalaman kepada

mahasiswa di Universitas Teuku Umar, tetapi juga aktif terlibat dalam penelitian-penelitian yang bertujuan untuk memahami dan meningkatkan mekanisme pemerintahan daerah serta upaya pengentasan kemiskinan. Turut memberikan kontribusi berarti dalam pengembangan pemikiran akademis melalui publikasi-publikasi ilmiahnya. Dengan fokus pada Pemerintahan Daerah, beliau menyumbangkan pemikiran kritis dan analisis mendalam yang memberikan wawasan baru terkait dengan tantangan dan peluang dalam tata kelola pemerintahan tingkat lokal.

Zaula Rizky Atika, merupakan seorang dosen yang memiliki dedikasi tinggi di program studi Administrasi Publik di Fakultas Sosial Humaniora, Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto. Pendidikan akademisnya dimulai dengan meraih gelar Sarjana (S1) di Jurusan Ilmu Administrasi Negara dari Universitas [Singkatan Universitas] pada tahun 2013, dan kemudian melanjutkan studi tingkat lanjut hingga meraih gelar Magister Ilmu Administrasi pada tahun 2016. Sebagai pendidik yang berpengalaman, Zaula Rizqi Atika memiliki minat kajian yang mendalam dalam bidang Manajemen Publik. Pengetahuan yang dimilikinya mencakup aspek-aspek esensial dalam administrasi publik, dengan fokus pada strategi dan implementasi manajemen yang efektif. Aktifitasnya tidak hanya terbatas pada dunia akademis, Zaula Rizqi Atika juga terlibat dalam kegiatan penelitian di bidang Administrasi Publik. Penelitiannya tidak hanya memberikan kontribusi pada perkembangan teori, tetapi juga berorientasi pada aplikasi praktis untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan efisiensi administratif.

Andi Zaelani, adalah tenaga pendidikan di Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto. Lahir 20 Juni 1980 di Desa Sokawera, Cilongok, Banyumas. Memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Administrasi Publik Fakultas Sosial, Ekonomi dan Humaniora Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto Tahun 2022. Dengan semangat untuk terus mengembangkan diri, saat ini sedang mengejar gelar Magister Administrasi Publik di Program Pasca Sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto sejak tahun 2022. Kecintaan mendalam terhadap dunia tulis-menulis bukan hanya mencerminkan komitmen terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, tetapi

juga turut serta berdedikasi untuk membagikan pengetahuan dan pengalaman yang berharga kepada para pembaca. Dengan cara ini, telah berhasil memperkaya wawasan dan perspektif bagi mereka yang terinspirasi untuk mengeksplorasi dan memahami lebih dalam mengenai Kajian Ilmu Administrasi Publik khususnya kajian tentang Determinan Penyebab Kemiskinan.

Ranjani, Perempuan yang lahir di Cilacap pada tanggal 19 Agustus 1996 menempuh Pendidikan Dasar hingga Menengah Atas di Kabupaten Cilacap. Pada tingkat Pendidikan Tinggi, penulis melanjutkan studi S1-nya di Universitas Jenderal Soedirman yang kemudian S2 di Universitas Gadjah Mada. Penulis kelahiran Kabupaten Cilacap ini memiliki minat pada studi Kebijakan Publik yang hasil kajiannya kemudian dituangkan pada beberapa karya ilmiah yang didesiminasi dan dipublikasikan di beberapa media publikasi.

PENGENTASAN KEMISKINAN

Agenda yang Tidak Pernah Selesai



Kemiskinan adalah fenomena sosial yang melibatkan ketidakmampuan individu atau rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, seperti makanan, air bersih, perumahan, pendidikan, dan layanan kesehatan. Ini adalah masalah global yang memengaruhi berbagai negara, termasuk Indonesia. Sinopsis ini akan membahas kemiskinan sebagai isu yang melibatkan berbagai aspek. Di Indonesia, kemiskinan adalah masalah yang kompleks dan serius. Meskipun telah terjadi penurunan tingkat kemiskinan selama beberapa dekade terakhir, tingkat kemiskinan masih cukup tinggi, mencapai sekitar 9,22% pada tahun 2020. Masalah ini melibatkan berbagai faktor penyebab, termasuk ketidaksetaraan pendapatan, akses terbatas ke pendidikan berkualitas, dan akses terbatas ke layanan kesehatan. Kemiskinan cenderung lebih merajalela di daerah pedesaan, di mana sektor pertanian masih menjadi mata pencaharian utama banyak orang. Pertanian yang rentan terhadap perubahan iklim, fluktuasi harga, dan masalah lainnya dapat menyebabkan kesulitan ekonomi bagi keluarga-keluarga di pedesaan. Pemerintah Indonesia telah berupaya mengatasi kemiskinan melalui berbagai program bantuan sosial, termasuk Kartu Sembako dan Kartu Prakerja, yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan pekerja dan memberikan akses ke perumahan dan layanan kesehatan. Pemerintah juga mendorong investasi di sektor-sektor ekonomi yang dapat menciptakan lapangan kerja baru. Tantangan di masa depan melibatkan memastikan pertumbuhan ekonomi yang adil, peningkatan akses pendidikan dan layanan kesehatan, serta pengurangan kesenjangan sosial dan ekonomi. Penting untuk diingat bahwa kemiskinan adalah masalah multidimensi yang memerlukan kerja sama lintas sektor, termasuk pemerintah, swasta, LSM, dan masyarakat sipil. Upaya berkelanjutan dan komprehensif dibutuhkan untuk mencapai perkembangan yang inklusif dan berkelanjutan di seluruh Indonesia. Dalam rangka mengatasi kemiskinan, peran bersama dari berbagai pemangku kepentingan sangat penting untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil, makmur, dan berkelanjutan.



PENERBIT WAWASAN ILMU
Anggota IKAPI (215/JTE/2021)

Email : naskah.wawasanilmu@gmail.com
WA : 089 535 969 2310
FB : Penerbit Wawasan Ilmu
IG : @penerbitwawasanilmu
@katalogwawasanilmu
Web : www.wawasanilmu.co.id

